

Katalog: 2101038.91



Sensus
Penduduk
2020

#Mencatat Indonesia

Analisis Profil Penduduk Provinsi Papua Barat



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA BARAT**



Sensus
Penduduk
2020

#MencatatIndonesia

Analisis Profil Penduduk Provinsi Papua Barat



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA BARAT**

Analisis Profil Penduduk Provinsi Papua Barat

Katalog : 2101038.91

No. Publikasi : 91000.2212

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman : viii + 49 halaman

Naskah :

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat

Penyunting :

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat

Gambar Kulit :

Direktorat Diseminasi Statistik

Diterbitkan oleh :

©Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Tim Penyusun

Pengarah : Maritje Pattiwaellapia SE, M.Si

Penanggung Jawab : Achmad Ali SST, M.Agb

Penyunting : Yeddi Apriansyakh, SST

Pengolah Data dan Penulis Naskah : Rizqi Aditya Nur Hidayah, SST

Penata Letak : Rizqi Aditya Nur Hidayah, SST

Ilustrasi Sampul : Sasint melalui *Pixabay.com*

<https://papuabarat.bps.go.id>

Kata Pengantar

Badan Pusat Statistik (BPS) telah berhasil melaksanakan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) Online (SPO) pada Bulan Mei 2020 dan telah melaksanakan SP2020 wawancara pada bulan September 2020. Meski dalam kondisi pandemi, SP2020 berhasil diselesaikan hingga tahap diseminasi data. Hasil SP2020 telah didiseminasikan dalam berbagai bentuk data, tabel, grafik, peta dan infografis. Disamping itu juga perlu suatu analisis yang lengkap, jelas dan menyeluruh terhadap indikator-indikator kependudukan dari hasil SP2020 untuk memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai kondisi penduduk Provinsi Papua Barat.

Salah satu bentuk diseminasi data yang menampilkan indikator-indikator kependudukan secara ringkas dan menyeluruh adalah Analisis Profil Penduduk yang dilakukan di level nasional dan provinsi, salah satunya adalah publikasi Analisis Profil Penduduk Provinsi Papua Barat yang berisikan analisis kondisi penduduk Provinsi Papua Barat berdasarkan hasil SP2020. Publikasi ini memuat tiga bahasan penting mengenai profil anak, profil penduduk usia produktif, dan profil penduduk lanjut usia Provinsi Papua Barat.

Publikasi ini dapat terwujud berkat kerja sama dan partisipasi dari berbagai pihak. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga publikasi ini bermanfaat dan dapat memenuhi kebutuhan banyak pihak untuk berbagai kepentingan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan pelaksanaan sensus penduduk di masa yang akan datang.

Manokwari, Juni 2022

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Papua Barat



Maritje Pattiwaellapia



Daftar Isi

Halaman

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
1. Pendahuluan.....	3
A. Jumlah Penduduk Indonesia Peringkat Keempat Dunia	3
B. Antara Kuantitas dan Kualitas.....	6
C. Kepadatan Penduduk dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah	7
D. Sebaran Menurut Provinsi	10
E. Perubahan Struktur Penduduk dan Implikasinya	10
2. Profil Anak.....	13
A. Anak dan bonus demografi.....	13
B. Struktur Pendudukan dan Persebaran Anak di Indonesia.....	16
C. Pendidikan anak	17
D. Kesehatan anak.....	17
E. Pekerja Anak	17
F. Perkawinan Anak.....	20
G. Kesimpulan.....	20
3. Profil Usia Produktif.....	23
A. Pendahuluan	23
B. Sebaran Menurut Provinsi.....	26
C. Profil Usia Produktif/Tenaga Kerja Menurut Kelompok Umur	27
D. Usia Produktif Di Dunia Kerja.....	27
E. Isu Strategis Penduduk Usia Produktif.....	27
F. Kesimpulan.....	30
4. Profil Penduduk Lanjut Usia	33
A. Lansia dan Bonus Demografi	33
B. Masalah yang Dihadapi Lansia	36
C. Lansia Indonesia dalam Perbandingan Internasional.....	37
D. Lansia SMART, Tantangan dan Peluang.....	37
E. Sebaran Lansia	37
F. Lansia dan Keluarga.....	38
G. Perlindungan Bagi Lansia	38
H. Potensi Lansia di Masa Setelah Bonus Demografi	40
I. Kesimpulan.....	40
Daftar Pustaka	41
Lampiran	43



1

Pendahuluan

- A. Posisi Penduduk Papua Barat di Indonesia
- B. Sebaran Penduduk Papua Barat menurut Kabupaten/Kota
- C. Antara Kualitas dan Kuantitas
- D. Perubahan Struktur Penduduk Papua Barat dan Implikasi Perubahan Struktur Penduduk di Masa yang akan Datang
- E. Kesimpulan



Jumlah penduduk Provinsi Papua Barat berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 berjumlah 1,1 juta jiwa atau 0,42 persen dari jumlah Penduduk Indonesia.

Pendahuluan

Sensus Penduduk 2020 mencatat jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 270,2 juta jiwa, meningkat 32,6 juta jiwa dari saat Sensus Penduduk 2010. Jumlah ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat negara-negara dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Tiongkok (1.439 juta jiwa), India (1.380 juta jiwa), dan Amerika Serikat (331 juta jiwa). Penduduk Indonesia tersebar pada 34 provinsi dengan kepadatan yang beragam.

A. Posisi Penduduk Papua Barat di Indonesia (Peringkat 33)

Provinsi Papua Barat atau sebelumnya disebut Provinsi Irian Jaya Barat merupakan provinsi yang terbentuk setelah era reformasi dan bukan ada dari awal Indonesia terbentuk. Provinsi Papua Barat merupakan wilayah yang terbentuk pada 12 Oktober 1999, pecah dari Provinsi Papua atau sebelumnya disebut sebagai Provinsi Irian Jaya. Berdasarkan hal tersebut membuat Provinsi Papua Barat baru mengalami kegiatan Sensus Penduduk sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 2010 dan tahun 2020. Jumlah penduduk Provinsi Papua Barat pada kegiatan Sensus Penduduk tahun 2000 dan sebelumnya masih tergabung dalam hasil provinsi induknya sebelumnya, yaitu Provinsi Papua.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Provinsi Papua Barat 760.422 jiwa dengan rincian 402.398 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 358,024 jiwa berjenis kelamin perempuan. Rasio jenis kelamin Provinsi Papua Barat pada tahun 2010 adalah 112 atau dapat dikatakan bahwa pada setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 112 jiwa penduduk laki-laki. Pada tahun 2010, jumlah penduduk Provinsi Papua Barat menempati posisi ke-33 dari total 33 provinsi di Indonesia, dengan total 0,32 persen dibanding total penduduk Indonesia.

Jika dibandingkan, Jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 mengalami kenaikan dari tahun 2010 seban-

Tabel 1. Jumlah Penduduk menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2020 (jiwa)

Provinsi	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	2.647.563	2.627.308	5.274.871
Sumatera Utara	7.422.046	7.377.315	14.799.361
Sumatera Barat	2.786.360	2.748.112	5.534.472
Riau	3.276.658	3.117.429	6.394.087
Jambi	1.810.015	1.738.213	3.548.228
Sumatera Selatan	4.320.078	4.147.354	8.467.432
Bengkulu	1.029.137	981.533	2.010.670
Lampung	4.616.805	4.391.043	9.007.848
Kepulauan Bangka Belitung	749.548	706.130	1.455.678
Kepulauan Riau	1.053.296	1.011.268	2.064.564
DKI Jakarta	5.334.781	5.227.307	10.562.088
Jawa Barat	24.508.885	23.765.277	48.274.162
Jawa Tengah	18.362.143	18.153.892	36.516.035
DI Yogyakarta	1.817.927	1.850.792	3.668.719
Jawa Timur	20.291.592	20.374.104	40.665.696
Banten	6.070.271	5.834.291	11.904.562
Bali	2.171.105	2.146.299	4.317.404
Nusa Tenggara Barat	2.656.208	2.663.884	5.320.092
Nusa Tenggara Timur	2.663.771	2.661.795	5.325.566
Kalimantan Barat	2.784.113	2.630.277	5.414.390
Kalimantan Tengah	1.385.705	1.284.264	2.669.969
Kalimantan Selatan	2.062.383	2.011.201	4.073.584
Kalimantan Timur	1.961.634	1.804.405	3.766.039
Kalimantan Utara	370.650	331.164	701.814
Sulawesi Utara	1.341.918	1.280.005	2.621.923
Sulawesi Tengah	1.534.706	1.451.028	2.985.734
Sulawesi Selatan	4.504.641	4.568.868	9.073.509
Sulawesi Tenggara	1.330.594	1.294.281	2.624.875
Gorontalo	591.349	580.332	1.171.681
Sulawesi Barat	720.187	699.042	1.419.229
Maluku	936.478	912.445	1.848.923
Maluku Utara	657.411	625.526	1.282.937
Papua Barat	597.128	536.940	1.134.068
Papua	2.294.813	2.008.894	4.303.707
Indonesia	136.661.899	133.542.018	270.203.917

Keterangan : Sensus Penduduk 2020

yak 373,65 jiwa menjadi berjumlah sebanyak 1,1 juta jiwa atau setara 0,42 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Pertumbuhan penduduk Provinsi Papua Barat selama periode tahun 2010-2020 berkisar pada 3,94 persen pertahun. Rincian jumlah penduduk menurut jenis kelamin adalah 597.128 jiwa penduduk laki-laki dan 536.940 jiwa penduduk perempuan. Jumlah ini menempatkan Provinsi Papua Barat pada urutan ke-33 dari 34 provinsi di Indonesia. Jumlah penduduk Provinsi Papua Barat hanya berada di atas Provinsi Kalimantan Utara, yang merupakan provinsi yang terakhir terbentuk dengan jumlah penduduk sebesar 0,7 juta jiwa atau 0,26 persen penduduk Indonesia.

B. Sebaran Penduduk Papua Barat menurut Kabupaten/Kota

Provinsi Papua Barat memiliki luas wilayah 102.955,15 km², dan terbagi dalam 13 wilayah administrasi kabupaten/kota meliputi 12 kabupaten dan 1 kota. Dengan luas tersebut menjadikan Papua Barat menjadi provinsi kelima terluas dari 34 provinsi di Indonesia. Luasnya wilayah Papua Barat

Tabel 2. Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2020 (jiwa)

Wilayah	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fakfak	43.656	41.541	85.197	105,1
Kaimana	32.643	29.613	62.256	110,2
Wondama	22.036	19.608	41.644	112,5
Teluk Bintuni	50.649	36.434	87.083	139,0
Manokwari	100.006	92.657	192.663	107,9
Sorong Selatan	27.422	25.047	52.469	109,5
Sorong	62.656	56.023	118.679	111,8
Raja Ampat	33.916	30.225	64.141	112,2
Tambrauw	14.780	13.599	28.379	109,0
Maybrat	21.733	21.258	42.991	102,2
Manokwari Selatan	18.589	17.360	35.949	107,1
Pegunungan Arfak	19.339	18.868	38.207	102,5
Kota Sorong	149.703	134.707	284.410	111,1
Papua Barat	597.128	536.940	1.134.068	105,8

Keterangan : Sensus Penduduk 2020

yang berbanding dengan rendahnya jumlah penduduk, tentu berpengaruh terhadap kepadatan penduduk. Papua Barat memiliki kepadatan penduduk hanya 11,02 jiwa/km² atau dapat diartikan untuk setiap km² wilayah Papua Barat rata-rata hanya dihuni 11 hingga 12 jiwa saja. Hal ini menjadikan Papua Barat sebagai provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk kedua terendah, dan Provinsi Kalimantan Utara sebagai nomor satu dengan kepadatan penduduk hanya 9,30 jiwa/km².

Agar dapat mengetahui kondisi Papua Barat secara lebih mendetil, tentu penting untuk melihat sebaran penduduk pada masing-masing Kabupaten/Kota yang ada, Dari 13 wilayah administrasi kabupaten/kota yang berada di Papua Barat, Kota Sorong merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, bahkan melebihi Kabupaten Manokwari yang merupakan ibu-kota provinsi. Rincian jumlah penduduk di masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel 2.

Berdasarkan tabel 2, terlihat bahwa kabupaten/kota dengan penduduk terbanyak adalah Kota Sorong dengan total penduduk berjumlah 284,4 ribu jiwa dan wilayah dengan penduduk paling sedikit adalah Kabupaten Tambrauw dengan jumlah 28,3 ribu jiwa. Terkait rasio jenis kelamin, baik secara provinsi maupun kabupaten/kota seluruhnya masih didominasi penduduk laki-laki. Hal ini terlihat dari rasio jenis kelamin yang nilainya di atas 100, yang mana cara membaca nilai rasio jenis kelamin ini adalah setiap nilai rasio jenis kelamin mewakili jumlah jiwa penduduk laki-laki dibandingkan dengan 100 jiwa penduduk perempuan. Misalkan untuk Provinsi Papua Barat, nilai rasio jenis kelaminnya adalah 105,8 artinya setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 105 hingga 106 penduduk laki-laki.

C. Antara Kuantitas dan Kualitas

Dengan menempati posisi ke-33 dari 34 provinsi di Indonesia, mengindikasikan bahwa jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat relatif lebih sedikit dibanding provinsi lainnya. Bahkan dibanding provinsi lain yang berada dalam satu pulau yang sama, Papua, jumlah penduduk Papua Barat hanya berkisar 1:4 jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Papua. Belum lagi jika dibandingkan dengan 3



Karena kuantitas penduduk belum menjadi permasalahan di Papua Barat, penting bagi pemerintah untuk fokus meningkatkan kualitas penduduknya.

provinsi besar di Pulau Jawa seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, tentu perbandingannya akan lebih terlihat signifikan lagi.

Dalam hal yang berkaitan dengan pembangunan manusia sebagai sumber daya dalam mengoperasikan sebuah negara yang berdaulat, tentunya faktor jumlah penduduk tidak serta merta menjadi kunci apakah suatu provinsi tertinggal dengan provinsi lain atau tidak. Pendidikan, potensi perekonomian, keberadaan dan pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, kesehatan, dan pendidikan tentu lebih berpengaruh dalam menentukan bagaimana pembangunan manusia di wilayah tersebut dibandingkan hanya dibandingkan secara kuantitas saja.

Jika ingin melihat kualitas manusia suatu wilayah, salah satu indikator yang dapat digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan perekonomian masyarakat pada wilayah tersebut. IPM Provinsi Papua Barat pada tahun 2020 berada pada nilai 65,09 atau termasuk dalam kategori IPM sedang (wilayah dengan nilai IPM berkisar pada 60-70), bersama dengan beberapa provinsi lain seperti Papua, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, dan beberapa provinsi lainnya.

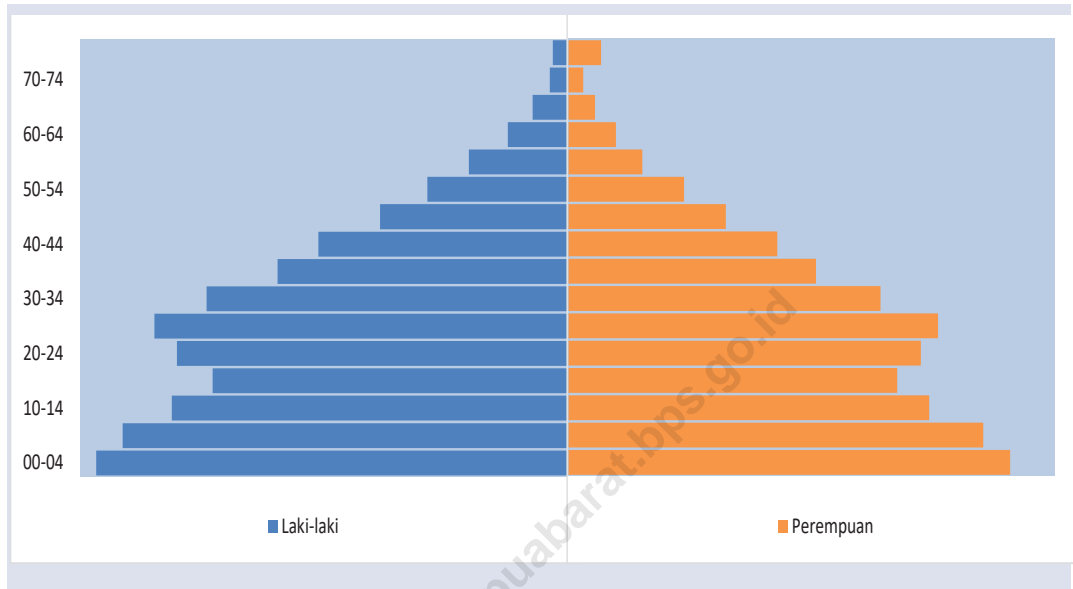
Banyak faktor yang mempengaruhi nilai IPM suatu wilayah. Usia Harapan Hidup (UHH) seseorang ketika lahir yang dipengaruhi oleh beragam faktor seperti penanganan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang ada di wilayah tersebut selama proses kehamilan hingga kelahiran, keberadaan fasilitas pendidikan formal dan pemerataannya lokasinya, serta rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita. Tentunya dengan semakin banyak jumlah penduduk suatu wilayah, upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai IPM akan lebih besar dibanding wilayah dengan penduduk lebih banyak.

Penyediaan sekolah yang mampu menampung siswa sesuai jenjang pendidikan dan umurnya, penyediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan, penyediaan lapangan usaha atau program pendukung kegiatan perekonomian lain, dsb. Tentu provinsi dengan cakupan wilayah yang luas memiliki kesulitan tersendiri juga dalam memastikan pemerataan fasilitas yang ada.



Piramida penduduk Provinsi Papua Barat mulai berubah dari yang pada tahun 2010 berbentuk genta, menjadi menuju piramida stasioner atau didominasi penduduk usia produktif

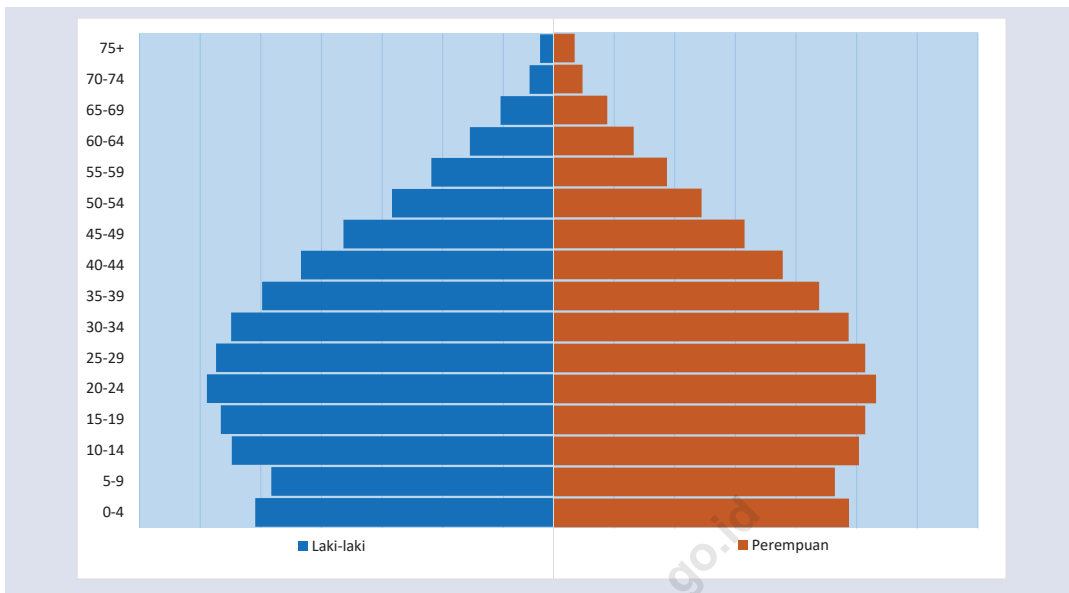
Papua Barat sebagai provinsi dengan wilayah terluas kelima dari 34 provinsi yang ada dan jumlah penduduk yang sedikit tentu memiliki permasalahan sendiri dalam mengatasi permasalahan terkait peningkatan kualitas penduduknya. Tutupan lahan yang sebagian besar didominasi hutan dan semak belukar, budaya masyarakat yang sering berpindah menyesuaikan



Gambar 1. Piramida Penduduk Provinsi Papua Barat, 2010

Pada gambar 1, piramida penduduk Provinsi Papua Barat berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 terlihat jelas bahwa kondisi piramida penduduknya masih didominasi penduduk usia anak. Meski pada tahun ini, penduduk bagian piramida penduduk usia produktif sudah mulai terlihat menonjol, namun masih belum melewati bagian piramida untuk penduduk usia anak atau dengan kata lain kondisi piramida penduduknya adalah ekspansif menuju stasioner. Tentunya pada kondisi piramida penduduk berbentuk ekspansif, kebijakan yang berkaitan dengan kependudukan akan diarahkan berkaitan dengan pengendalian jumlah penduduk, untuk menghindari ledakkan penduduk usia anak. Hal-hal seperti program Keluarga Berencana (KB), pengawasan dan tindakan preventif berkaitan dengan pernikahan anak, menjadi pilihan dari beberapa tindakan yang dapat dilakukan.

Berbeda dengan gambar 1, gambar 2 menunjukkan bahwa frekuensi jumlah penduduk tertinggi ada pada kelompok umur dewasa dimulai pada kelompok umur 20-24 tahun. Frekuensi jumlah penduduk kelompok umur 0-4 tahun masih cukup banyak, namun memasuki kelompok umur 5-9 tahun jumlahnya mulai menurun, dan lebih sedikit dibanding frekuensi penduduk di kelompok usia produktif. Hal ini menjadi indikasi bahwa Provinsi Papua Barat telah mulai masuk pada era menikmati bonus demografi. Secara teori, semakin banyaknya jumlah penduduk usia produktif, tentu akan semakin baik juga produktifitas wilayah tersebut, yang berkaitan juga dengan kondisi ekonomi yang semakin baik.



Gambar 2. Piramida Penduduk Provinsi Papua Barat, 2020

Selama beberapa waktu yang akan datang, Provinsi Papua Barat akan masih menikmati fenomena bonus demografi yang ada. Tentunya kondisi ini tidak akan bertahan dalam jangka waktu lama, karena Provinsi Papua Barat telah mulai masuk pada fase piramida stationer. Pemerintah perlu mengantisipasi dan membuat kebijakan dan perencanaan yang akan membuat efek baik yang timbul dari bonus demografi dapat dimanfaatkan dengan optimal mengingat setelah fase dominasi penduduk usia produktif, selanjutnya akan muncul fase dominasi penduduk usia lanjut yang sebelumnya merupakan bagian dari bonus demografi yang ada. Tanpa persiapan dan perencanaan yang baik, ke depannya bonus demografi akan menimbulkan masalah setelah mereka tak lagi berada di fase usia produktif, yang tentunya akan menambah beban pada rasio ketergantungan (*dependency ratio*).

Pada tahun 2020, rasio ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun) 42,24, menurun dari tahun 2010 yang sebesar 55,72. Semakin kecil nilai rasio ketergantungan menunjukkan bahwa beban penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) dan usia tidak produktif lagi (65+ tahun) yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif semakin sedikit. Angka rasio ketergantungan penduduk Provinsi Papua Barat berdasarkan Sensus Penduduk 2020 sudah lebih rendah dari angka nasional yaitu 44,33. Tentu saja rasio ketergantungan yang rendah tidak serta merta menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan akan lebih tinggi. Hal ini yang depannya perlu menjadi perhatian pemerintah, agar tidak hanya fokus pada indikator kependudukan seperti rasio ketergantungan, namun juga mulai menghubungkannya dengan indikator perekonomian seperti pengeluaran perkapita untuk melihat lebih dalam terkait kesejahteraan penduduk.

lahan pertanian yang sedang digarap, lokasi kampung yang terkadang berpindah karena permasalahan kondisi alam sekitarnya atau permasalahan sosial seperti adat dan hak ulayat, merupakan beberapa contoh kendala yang dihadapi oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten di Papua Barat dalam upaya peningkatan kualitas penduduknya. Pada wilayah yang lebih kecil, dan jumlah penduduk yang sama, tentu akan lebih mudah menentukan jumlah fasilitas kesehatan dan pendidikan yang perlu dibangun, juga penyiapan tenaga kesehatan dan tenaga pengajar yang akan ditugaskan. Namun pada wilayah yang luas dan penduduknya cenderung tersebar, tentu tidak memungkinkan menyediakan fasilitas yang ada untuk semua wilayah terkecil seperti pada level distrik/kecamatan.

Dengan kondisi yang ada, menjadi penting bagi pemerintah daerah membuat perencanaan jangka panjang yang baik. Diharapkan beriringan dengan jumlah penduduk yang akan bertambah pada waktu mendatang, fasilitas yang telah ada dapat terus berfungsi baik dan jika diperlukan dapat dibangun fasilitas baru guna menjangkau kebutuhan.



Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed diam
nonummy

D. Perubahan Struktur Penduduk Papua Barat dan Implikasi Perubahan Struktur Penduduk di Masa yang akan Datang

Kehidupan pada dasarnya bersifat fluktuatif bagaikan roda yang berputar, tidak hanya menetap pada satu titik saja, begitupun pada struktur penduduk suatu wilayah yang dapat dipengaruhi beragam faktor demografi mulai dari kelahiran, kematian, hingga migrasi.

Perubahan struktur penduduk juga dialami Provinsi Papua Barat. Meski perubahan ini terjadi secara perlahan, dan tidak terlalu terlihat jika diamati dalam jangka waktu sebentar. Pada tahun 2010, struktur penduduk Provinsi Papua Barat didominasi penduduk usia anak-anak, memperlihatkan piramida penduduk berbentuk genta atau lonceng yang gemuk di usia muda dan semakin mengerucut ke atas. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, struktur piramida penduduknya sudah mulai menuju fase piramida



2

Profil Anak

- A. Anak dan bonus demografi
- B. Struktur Pendudukan dan Sebaran Anak di Kabupaten Kota
- C. Pendidikan anak
- D. Kesehatan anak
- E. Pekerja Anak
- F. Perkawinan Anak
- G. Kesimpulan



Terminologi WHO tentang penduduk usia anak mengacu pada “bayi baru lahir” (1-28 hari), “bayi” (hingga 12 bulan), “anak-anak” (1 hingga 10 tahun), dan “remaja” (10 hingga 19 tahun) (World Health Organization, 2008).

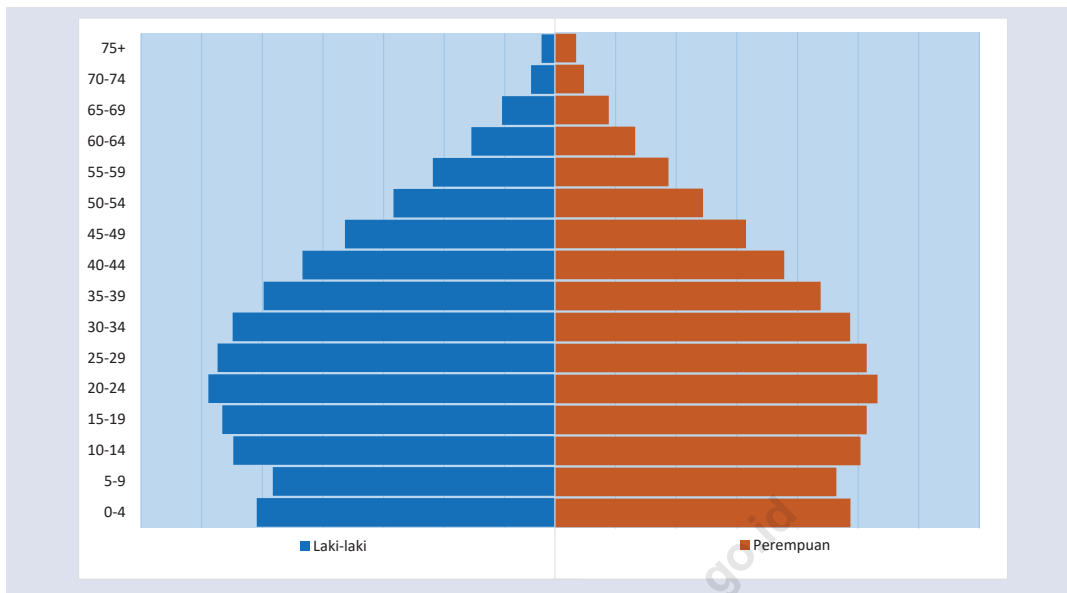
Profil Anak Provinsi Papua Barat

Anak merupakan bagian tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia serta keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Anak-anak merupakan agen perubahan yang diharapkan dapat membawa bangsa dan negara menjadi lebih baik di masa mendatang. Oleh sebab itu anak-anak harus mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Di sinilah peranan pemerintah melalui kebijakan diharapkan dapat menunjang pemenuhan hak anak-anak demi pengembangan diri secara optimal.

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak-anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa anak-anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Anak-anak juga berhak mendapat pelayanan kesehatan yang komprehensif sejak dalam kandungan. World Health Organization (WHO) menggunakan istilah anak-anak untuk semua kelompok umur dari lahir hingga usia 19 tahun. Namun demikian, terminologi WHO mengacu pada “bayi baru lahir” (1-28 hari), “bayi” (hingga 12 bulan), “anak-anak” (1 hingga 10 tahun), dan “remaja” (10 hingga 19 tahun) (World Health Organization, 2008). Dalam publikasi ini, definisi anak yang digunakan mengacu pada konsep yang ditetapkan WHO.

A. Anak dan Bonus Demografi

Bonus demografi kondisi saat struktur penduduk suatu negara didominasi penduduk usia produktif. Bonus demografi memberikan peluang dan juga tantangan pada negara yang mengalaminya. Peluang yang dimaksud berkaitan dengan peningkatan kondisi perekonomian sebagai dampak dari banyaknya penduduk usia produktif yang tentunya berhubungan juga dengan rasio ketergantungan (dependency ratio). Tantangan dari tingginya penduduk usia produktif mengarah pada bagaimana negara memanfaatkan jumlah sumber daya manusia yang besar tersebut agar memiliki produktivitas yang tinggi, salah satunya berkaitan dengan ketersediaan lapangan kerja.



Gambar 1. Piramida Penduduk Provinsi Papua Barat, 2020

Berdasar Sensus Penduduk 2020, kondisi piramida penduduk Papua Barat yang berbentuk piramida ekspansif (muda) dengan jumlah penduduk usia 0-19 tahun berjumlah 407,52 ribu atau berkisar 35,93 persen dari jumlah penduduk. Hal tersebut menunjukkan bahwa Papua Barat masih berada pada jendela peluang untuk menikmati bonus demografi. Di sini peran penting pemerintah diperlukan dalam menyusun kebijakan yang akan menunjang pemenuhan hak-hak anak untuk memastikan mereka dapat mengembangkan potensinya dengan optimal.

Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia sejak tahun 2020, berdampak pada masyarakat luas dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan terutama aspek kesehatan dan perekonomian. Meski tidak terlihat secara langsung, Pandemi juga mempengaruhi anak-anak dari segi pendidikan dan peluang pengembangan diri. Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan sebagai kebijakan untuk mengurangi peluang penyebaran pandemic Covid-19 menyebabkan kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka baik untuk tingkat pendidikan dasar maupun tinggi sempat terhenti untuk waktu yang lama. Meski tersedia solusi dengan pembelajaran virtual, tentunya tidak bisa sepenuhnya menggantikan pengalaman yang diperoleh dari interaksi selama pembelajaran tatap muka terutama pada hal-hal yang membutuhkan sarana-prasarana pendukung yang hanya terdapat di sekolah seperti alat-alat praktikum.

B. Struktur Penduduk dan Sebaran Anak Menurut Kabupaten/Kota

Jumlah penduduk Papua Barat berdasar hasil Sensus Penduduk 2020 adalah 1,13 juta jiwa. Meningkat dari 760,4 ribu jiwa berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010. Jika dikelompokkan berdasar usia produktif, penduduk usia belum produktif (usia <15 tahun) berjumlah 286,8 ribu jiwa atau 25,29 persen, penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) berjumlah 803,7 ribu atau 70,87 persen, dan

penduduk usia tidak lagi produktif 43,5 ribu jiwa atau 3,84 persen. Piramida penduduk Papua Barat berbentuk lonceng, yang artinya struktur penduduk Papua Barat masih didominasi penduduk usia muda.

Penduduk usia 0-19 tahun di Papua Barat pada tahun 2020 berjumlah 407,5 ribu jiwa, bertambah dari 329,7 ribu jiwa pada tahun 2010. Meski jumlahnya meningkat, persentase penduduk usia 0-19 tahun terhadap seluruh penduduk menurun dari 43,36 persen pada 2010 menjadi 35,93 persen pada tahun 2020.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Papua Barat Usia 0-19 Tahun Menurut Wilayah

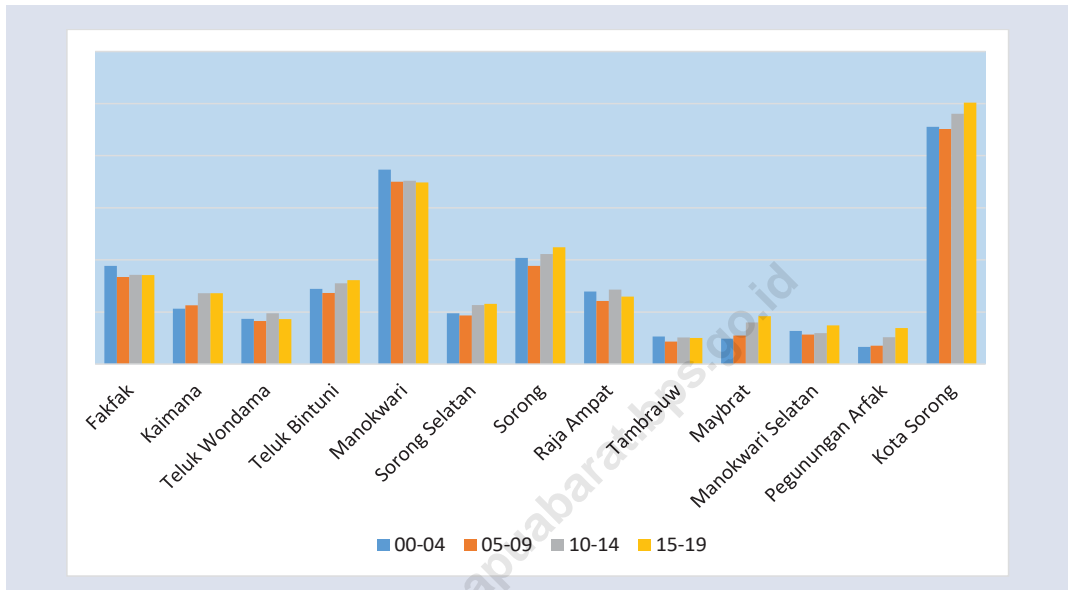
Wilayah (1)	Jumlah Penduduk Usia 0-19 Tahun (Jiwa) (2)	Persentase Penduduk Usia 0-19 Tahun terhadap Total Penduduk (3)
Fakfak	34.892	40,95
Kaimana	24.575	39,47
Teluk Wondama	17.656	42,40
Teluk Bintuni	29.836	34,26
Manokwari	71.222	36,97
Sorong Selatan	21.006	40,04
Sorong	41.389	34,87
Raja Ampat	26.669	41,58
Tambrau	9.872	34,79
Maybrat	13.766	32,02
Manokwari Selatan	12.725	35,40
Pegunungan Arfak	9.464	24,77
Kota Sorong	94.455	33,21
Papua Barat	407.527	35,93

Sumber Tabel : Sensus Penduduk 2020

Jumlah penduduk usia 0-19 tahun di masing-masing kabupaten/kota sangat beragam, dengan jumlah penduduk usia 0-19 tahun terbanyak tetap di Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari yang merupakan dua kabupaten/kota dengan penduduk terbanyak. Namun wilayah dengan persentase penduduk usia 0-19 tahun terhadap total penduduk tertinggi adalah Kabupaten Teluk Wondama dengan 42,40 persen dan Kabupaten Raja Ampat dengan 41,58 persen. Kabupaten lainnya memiliki nilai persentase yang sedikit lebih kecil dibanding dua kabupaten tersebut dan Kabupaten Pegunungan Arfak merupakan wilayah dengan persentase penduduk usia 0-19 terhadap total penduduk terendah yaitu 24,77 persen.

Secara persentase, penduduk usia 0-19 tahun masih cukup mendominasi struktur umur penduduk di seluruh wilayah Papua Barat. Jumlah penduduk usia 0-19 tahun memang meningkat, dari sebelumnya 329.737 jiwa berdasarkan hasil Sensus

Penduduk 2010 menjadi 407.527 jiwa berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020. Namun secara persentase dibandingkan jumlah penduduk, jumlahnya turun cukup jauh dari sebelumnya 43,36 persen menjadi 35,93 persen. Hal ini menjadi indikasi bahwa sudah mulai terjadi pergeseran struktur penduduk di wilayah Papua Barat yang sebelumnya didominasi penduduk usia anak menjadi mulai bergeser menjadi penduduk usia dewasa.



Gambar 2. Distribusi Penduduk Usia 0-19 menurut Wilayah dan Kelompok Umur, 2020

Berdasarkan grafik pada gambar 2, perbedaan jumlah penduduk pada masing-masing kelompok umur tidak terlalu signifikan. Namun jika diperhatikan lebih rinci, pada beberapa wilayah, penduduk usia anak sudah mulai didominasi penduduk usia remaja (10-14 tahun dan 15-19 tahun). Hal ini terjadi pada beberapa kabupaten seperti Kabupaten Kaimana, Maybrat, Pegunungan Arfak, dan Kota Sorong. Sedangkan pada Kabupaten Fakfak dan Manokwari, penduduk usia balita masih lebih mendominasi. Dengan distribusi penduduk usia anak yang berbeda tentu membutuhkan kebijakan yang berbeda dalam menunjang pengembangan penduduknya, Contoh sederhananya, untuk kabupaten dengan penduduk usia balita yang lebih dominan penting untuk memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan penunjang seperti Posyandu yang dapat menunjang pemerataan program pemerintah seperti imunisasi, konsumsi obat cacing, pemberian makanan tambahan, dan untuk wilayah yang didominasi kelompok umur yang lebih dewasa, tentunya fasilitas penunjang pendidikan menjadi penting untuk

Penduduk usia 0-19 tahun pada tahun 2020 masih cukup mendominasi struktur penduduk Papua Barat dengan 35,93 persen.

diperhatikan.

C. Pendidikan Anak

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Indonesia, sejak awal berdirinya menyanggapi pendidikan merupakan bagian penting dalam perkembangan penduduknya. Hal ini dapat dilihat pada tujuan negara yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945 alinea ke-empat yang berbunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Lebih lanjut, pada UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal ini mengamanatkan bahwa semua warga negara, termasuk anak-anak, berhak mendapatkan pendidikan, terutama pendidikan Sekolah Dasar, tanpa terkecuali.

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar yang merupakan dasar program wajib belajar 9 tahun, mendorong masyarakat untuk minimal menyelesaikan pendidikan dasar selama 9 tahun atau setara dengan menamatkan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau jenjang pendidikan lain yang setara. Kemudian melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar, pemerintah mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dengan memberikan bantuan pendidikan kepada masyarakat yang terkendala secara ekonomi.

Adanya beragam program yang mendukung tersedianya pendidikan yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat tentunya diharapkan dapat meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat tanpa terkecuali. Hal ini tentunya menjadi langkah Indonesia dalam meraih tujuannya seperti yang tertera pada Pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk melihat perkembangan kondisi pendidikan di Indonesia, ada beberapa indikator yang dapat dihasilkan oleh BPS, di antaranya :

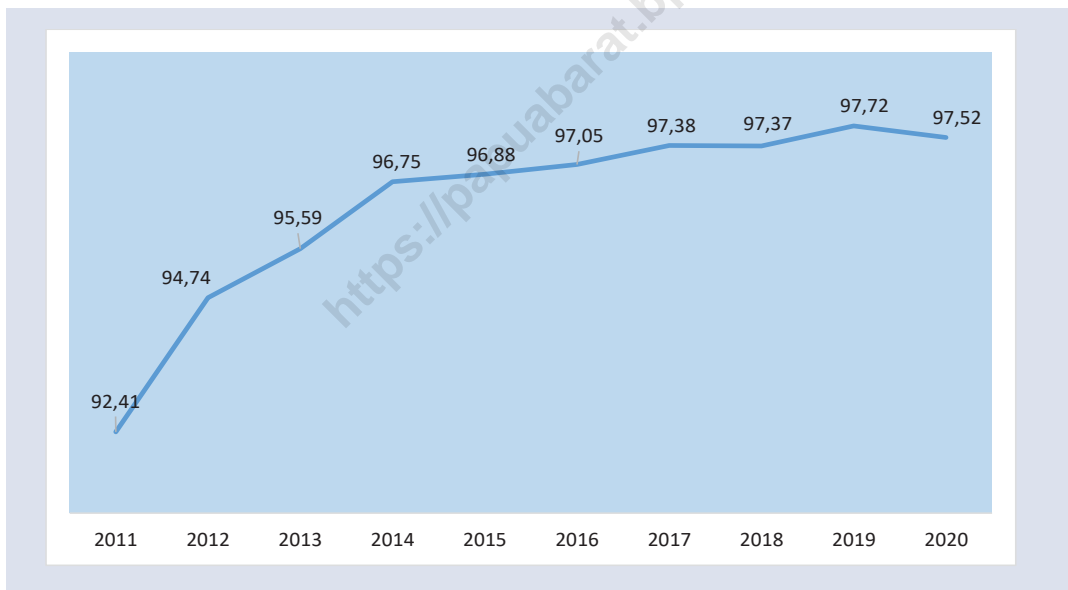
- Angka Melek Huruf : Proporsi penduduk usia tertentu yang dapat membaca dan atau menulis huruf Latin atau huruf lainnya terhadap penduduk usia tertentu
- Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) : jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal
- Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) : lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang

- Angka Partisipasi Sekolah (APS) : proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut
- Angka Partisipasi Kasar (APK) : Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut
- Angka Partisipasi Murni (APM) : Proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya.

Angka Melek Huruf Provinsi Papua Barat telah melewati angka 90 persen sejak tahun 2009, dan pada tahun 2020 telah mencapai nilai 97,91 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa 97,91 persen penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Papua Barat dapat membaca dan atau menulis minimal menggunakan salah satu jenis aksara/huruf.



Angka Melek Huruf
Provinsi Papua Barat
tahun 2020 mencapai
97,91 persen,



Gambar 3. Perkembangan Angka Melek Huruf Provinsi Papua Barat, 2009-2020

Angka Melek Huruf di hampir seluruh provinsi di Indonesia telah menyentuh angka di atas 90 persen, hal ini menjadikan Angka Melek Huruf sulit untuk dijadikan indikator perkembangan kondisi pendidikan. Sehingga diperlukan indikator lain untuk menjadi indikator pembandingan. Sehingga kita perlu melihat dari berbagai indikator lain untuk mengetahui apakah kondisi pendidikan di Papua Barat mengalami peningkatan terutama pada rentang usia 7-18 tahun yang masuk

dalam rentang usia wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah. Indikator tersebut antara lain Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Tabel 2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Papua Barat menurut Kelompok Umur, Jenjang Pendidikan, dan Wilayah, 2020

Wilayah (1)	APS			APM		
	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	SD/MI	SMP/MTS	SMA/MA
	(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)
Fakfak	98.81	98.11	89.81	96.50	75.81	66.81
Kaimana	98.80	98.52	75.57	96.70	58.59	52.03
Teluk Wondama	97.21	96.27	71.72	91.97	66.28	40.13
Teluk Bintuni	96.29	95.94	72.20	93.48	69.06	57.50
Manokwari	96.73	96.56	86.26	92.71	76.80	69.24
Sorong Selatan	98.81	97.87	79.96	93.48	56.90	56.06
Sorong	98.66	97.43	88.14	95.95	74.39	65.85
Raja Ampat	96.11	94.70	68.29	94.62	51.26	47.87
Tambrau	95.55	94.86	81.65	93.39	58.27	48.69
Maybrat	98.50	97.53	81.93	97.33	86.66	68.09
Manokwari Selatan	94.77	93.61	66.17	94.39	72.87	47.76
Pegunungan Arfak	95.15	93.59	77.75	95.15	51.60	49.04
Kota Sorong	99.48	97.13	82.72	91.77	73.21	71.39
Papua Barat	97.89	96.87	81.51	93.88	70.51	63.62

Sumber Tabel : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), 2020

Berdasarkan data pada tabel 2, seiring dengan meningkatnya kelompok umur atau jenjang pendidikan, angka partisipasinya cenderung semakin menurun. Berdasarkan Angka Partisipasi Sekolah untuk kelompok umur 7-12 tahun pada tahun 2020, di seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat telah mencapai angka di atas 95 persen, yang artinya jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang masih menempuh pendidikan formal pada tahun 2020 mencapai lebih dari 95 persen. Begitupun untuk kelompok umur 13-15 tahun yang juga telah mencapai lebih dari 90 persen. Hal ini merupakan pencapaian yang sangat baik mengingat fasilitas pendidikan yang belum merata di seluruh wilayah distrik/kecamatan di

Provinsi Papua Barat. Tentu perlu menjadi perhatian lebih pada Angka Partisipasi Sekolah untuk kelompok umur 16-18 tahun, karena nilainya berbeda cukup besar dibanding dengan dua kelompok umur lainnya dengan nilai APS kelompok umur 16-18 tahun Papua Barat hanya berada pada angka 81,51 persen.

Angka Partisipasi Murni Papua Barat menunjukkan nilai yang lebih rendah lagi dibanding Angka Partisipasi Sekolahnya baik pada level provinsi maupun pada masing-masing kabupaten/kota. Hal ini menjadi indikasi bahwa masih banyak penduduk yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ataupun jika melanjutkan, maka pendidikan tidak ditempuh pada batasan umur yang distandarkan (Usia 7-12 tahun untuk jenjang SD, 13-15 tahun untuk jenjang SMP, dan 16-18 tahun untuk jenjang SMA).

Beberapa faktor yang dipandang berpengaruh yang dipandang berperan terhadap angka partisipasi sekolah penduduk antara lain adalah fasilitas pendidikan yang belum merata, kualitas dan komitmen guru belum cukup baik, dan kesadaran masyarakat (Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, 2018). Tentunya perlu dilakukan *Indepth-Study* lebih lanjut oleh pemerintah daerah untuk mengetahui secara pasti faktor yang mempengaruhi kecenderungan penduduk untuk hanya menamatkan pendidikan dasar saja tanpa merasa perlu menempuh pendidikan wajib hingga 12 tahun di masing-masing kabupaten/kota untuk menemukan solusi yang paling tepat menangani permasalahan pendidikan ini agar tujuan negara seperti yang diamanatkan UUD 1945 untuk mencerdaskan bangsa dapat diwujudkan.

D. Kesehatan anak

Masa anak usia dini dianggap sebagai fase perkembangan yang paling penting dalam kehidupan. Oleh karena itu anak harus dihindarkan dari setiap gangguan pada perkembangan anak usia dini sebagai dampak dari ketidaksetaraan kesehatan baik berupa kondisi lingkungan fisik maupun pola asuh seperti kondisi lingkungan, gizi, pemanfaatan layanan kesehatan yang kurang tepat dapat menghambat pertumbuhan normal anak tersebut (Chithra et al 2016).

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan anak secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Upaya kesehatan anak dilakukan sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Salah satu tujuan upaya kesehatan anak adalah menjamin kelangsungan hidup anak melalui upaya menurunkan angka kematian bayi baru lahir, bayi dan balita.

Upaya kesehatan anak tentu beragam tergantung dari usianya. Pemberian asi, imunisasi, vitamin A, obat cacing, makanan tambahan, dan pemantauan berat badan merupakan beberapa contoh upaya kesehatan yang dilakukan terutama pada bayi dan balita untuk memastikan kesehatan dan meminimalisir resiko kesehatan yang dialami baik yang dapat disebabkan oleh virus dan bakteri maupun karena kurangnya kecukupan gizi bayi dan balita yang dapat memicu *stunting*.

Pada tahun 2020, cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi di Provinsi Papua Barat baru mencapai 66,4 persen. Masih sangat jauh dari target Rencana Strategis Nasional 2020 sebesar 92,9 persen. Angka ini memposisikan Papua Barat berada di posisi 27 dari 34 provinsi.



Persentase penduduk usia anak yang mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir pada tahun 2020 mencapai 32,29 persen.

Rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap ini juga beriringan dengan persentase balita (0-59 bulan) dengan berat badan sangat kurang dan berat badan kurang. Berdasarkan data Ditjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2021, persentase balita (0-59 bulan) dengan berat badan sangat kurang dan kurang di Provinsi Papua Barat masing-masing sebesar 3,3 persen dan 12,8 persen, atau secara total 16,1 persen. Angka ini menempatkan Provinsi Papua Barat

di posisi tertinggi kedua, hanya berada di bawah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang secara total mencapai 18,3 persen. Kedua indikator ini tentu menjadi *red sign* bagi pemerintah daerah, bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan untuk memperbaiki permasalahan kesehatan pada balita berkaitan dengan imunisasi dasar dan balita *stunting*.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), pada tahun 2020, sebanyak 32,29 persen penduduk usia anak (0-17 tahun) mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir. Sebarannya hampir sama untuk anak laki-laki dan perempuan yaitu 32,50 persen untuk anak laki-laki dan 32,28 persen untuk anak perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa 1 dari 3 anak Indonesia mengalami keluhan kesehatan. Jika dilihat dari tipe daerah, penduduk 0-17 tahun di perkotaan lebih banyak mengalami keluhan Kesehatan dibandingkan di perdesaan. Di daerah perdesaan sekitar 30 persen daerah perkotaan anak mengalami keluhan kesehatan, sedangkan di perkotaan mencapai 34 persen penduduk.

E. Pekerja Anak

Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak mencakup perlindungan dari eksploitasi anak, dimana salah satunya berkaitan dengan eksploitasi ekonomi, yaitu mempekerjakan anak guna mendukung kondisi perekonomian keluarga. Bentuk mempekerjakan anak bisa dengan meminta anak membantu kegiatan orang tua yang bertujuan menghasilkan atau secara sederhana menjadikannya pekerja keluarga, maupun menjadikan mereka sebagai pekerja di tempat lain.

Internasional Labour Organization (ILO) menyatakan bahwa pekerja usia anak dapat mengganggu masa kecil anak, menurunkan potensi anak, dan harga diri anak, yang secara jangka panjang dapat berpengaruh buruk bagi perkembangan fisik maupun mental anak. Anak yang bekerja merupakan anak yang melakukan pekerjaan dalam rangka membantu orang tua, melatih tanggung jawab, disiplin atau keterampilan yang dilakukan dalam dilakukan dalam jangka waktu pendek dan di luar waktu sekolah, serta tidak ada unsur eksploitasi di dalamnya. Sedangkan, pekerja anak

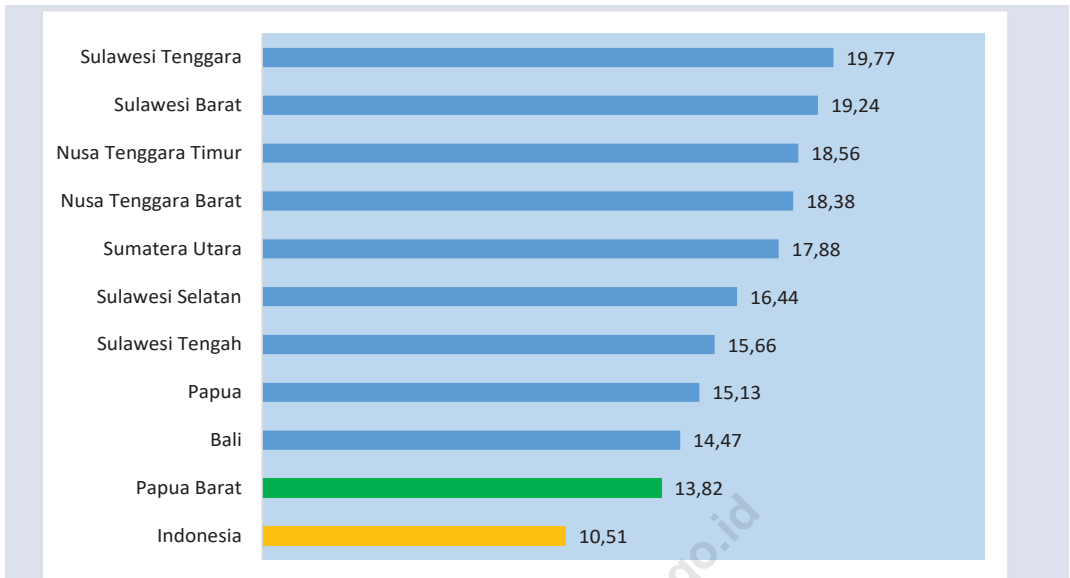
adalah setiap anak yang melakukan pekerjaan yang memiliki sifat dan intensitas dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan dan keselamatan anak serta tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, sosial, dan intelektualnya.

Terlibatnya anak-anak dalam kegiatan perekonomian keluarga merupakan akibat dari tekanan ekonomi yang memaksa anak untuk turut bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu adanya beberapa budaya yang menganggap bahwa bekerja merupakan proses anak menuju kedewasaan serta bentuk darma bakti anak terhadap orang tua juga turut menjadi penyebab anak bekerja.

Dalam upaya perlindungan anak terutama anak yang bekerja Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 melalui Undang- Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Mengenai Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Dalam konvensi tersebut, ILO menentukan batas minimum anak diperbolehkan untuk bekerja adalah 15 tahun. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa pengusaha dilarang memperkerjakan anak, kecuali anak yang telah berusia 13-15 tahun dengan syarat bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh anak merupakan pekerjaan ringan, tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Undang-undang tersebut juga menentukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:

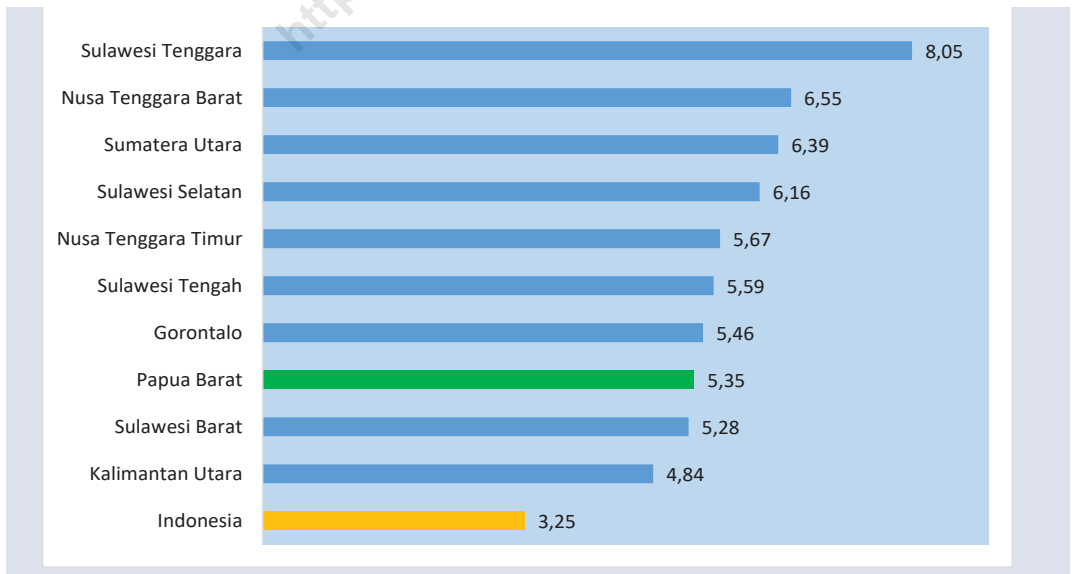
- a. Izin tertulis dari orang tua/wali;
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali;
- c. Waktu kerja maksimum 3 jam;
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. Memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas;
- g. Menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku.

Definisi anak bekerja yang digunakan BPS adalah anak yang melakukan kegiatan ekonomi minimal satu jam secara berturut-turut (tidak terputus) dalam periode seminggu yang lalu dan kegiatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan dalam bentuk uang maupun barang. Selain itu, kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi juga dihitung. Profil anak yang bekerja disajikan dalam grafik dan table menurut kelompok usia, jenis kelamin, tipe daerah tempat tinggal, pendidikan, lapangan pekerjaan, status pekerjaan, dan upah/gaji/ pendapatan. Kelompok usia anak dibagi menjadi tiga kelompok usia yaitu 10-12, 13-14, dan 15-17 tahun didasarkan pada Konvensi ILO Nomor 138 dengan batas minimal usia anak boleh bekerja adalah 15 tahun dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memberikan pengecualian pada anak usia 13-15 tahun.



Gambar 4. Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun yang Termasuk Angkatan Kerja, 2020

Provinsi Papua Barat termasuk dalam 10 provinsi dengan persentase penduduk usia 10-17 tahun yang termasuk angkatan kerja tertinggi dengan persentase 13,82 persen, berada di atas angka nasional yang sebesar 10,51 persen. Berdasarkan konsep BPS, penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang berstatus bekerja, memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang menanggur. Dapat diartikan bahwa 13,82 persen dari penduduk usia 10-17 tahun di Provinsi Papua Barat sudah secara aktif bekerja atau mencari pekerjaan.



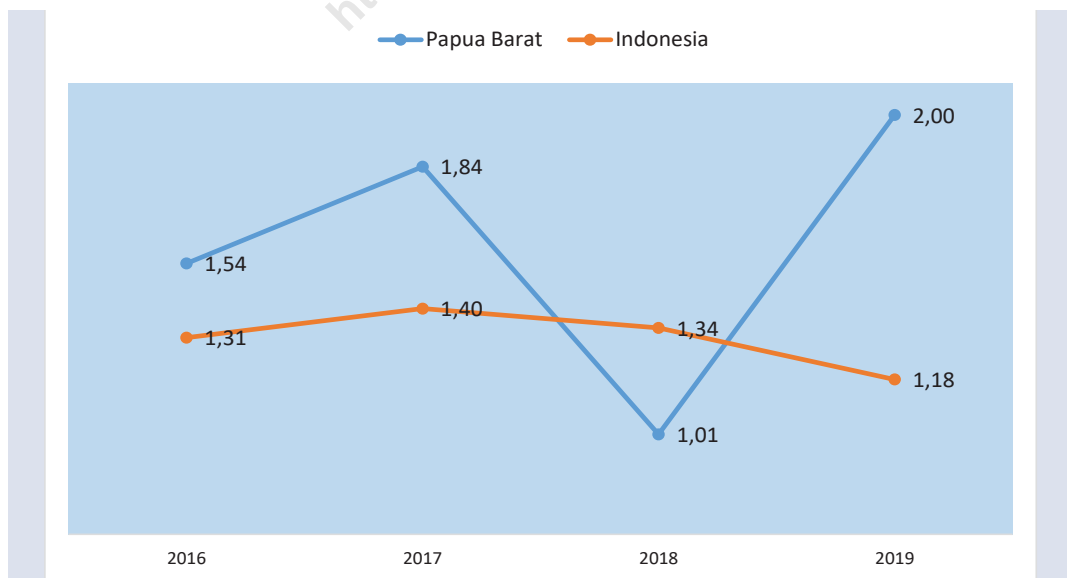
Gambar 5. Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun yang Bekerja, 2020

Persentase penduduk usia 10-17 tahun yang bekerja di Provinsi Papua Barat juga masuk dalam 10 tertinggi di Indonesia dengan nilai sebesar 5,35 persen. Meski nilainya cukup kecil hanya berkisar 5 persen, namun tetap perlu perhatian lebih dari semua pihak yang terkait baik dari pemerintah, orang tua, pihak pemberi kerja untuk menangani hal ini. Karena anak usia 10-17 tahun seharusnya masih bisa fokus pada pendidikannya, mengingat mereka masih masuk dalam target program wajib belajar 9 tahun maupun program wajib belajar 12 tahun.

F. Perkawinan Anak

Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sebelumnya UU Nomor 1 Tahun 1974 menentukan batas usia minimum perempuan untuk menikah adalah 16 tahun. Ketentuan ini memungkinkan terjadinya perkawinan anak pada pihak mempelai perempuan karena jika sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak-anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perkawinan usia anak bukan merupakan kasus yang langka di Indonesia. Berdasarkan laporan penelitian Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) bersama UNICEF, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2020 Indonesia menempati peringkat ke-10 jumlah perkawinan anak tertinggi di dunia. Laporan penelitian tersebut menyebutkan sekitar 1.220.900 anak Indonesia mengalami perkawinan dini. Permasalahan pernikahan dini memang menjadi suatu permasalahan yang sudah terjadi lama namun hingga kini belum dapat dipecahkan.



Gambar 6. Persentase Anak Perempuan Umur 10-17 Menurut Provinsi dan Status Perkawinan berstatus “Kawin”, 2016-2019

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Publikasi Profil Anak Indonesia diperoleh informasi bahwa persentase penduduk wanita usia 10-17 tahun yang telah berstatus “kawin” mencapai angka 2,00 persen. Meski angka tersebut terlihat kecil, data ini hanya menyatakan persentase penduduk wanita usia 10-17 tahun yang berstatus “kawin”, tanpa melihat usia kawin pertamanya. Tentu memerlukan data pendukung lain untuk memastikan tren usia kawin pertama baik penduduk perempuan maupun laki-laki di Provinsi Papua Barat.

Perkawinan anak dapat berdampak pada anak dalam beragam aspek seperti aspek pendidikan, kesehatan, dan juga partisipasi anak secara ekonomi di dalam keluarga ke depannya. Perkawinan anak mengingkari hak anak untuk memperoleh pendidikan, bermain, dan mencapai potensi mereka secara optimal karena dapat mengganggu atau mengakhiri masa penting kehidupan mereka sebagai anak-anak, ketika hak-hak mereka diakui dan tertuang dalam Konvensi Hak Anak.

Anak yang menikah, baik perempuan maupun laki-laki, dipaksa untuk mengambil tanggung jawab orang dewasa ketika mereka mungkin belum siap. Perkawinan anak membuat anak laki-laki lebih awal menjadi seorang ayah dan dengan situasi itu menambah tekanan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, memotong masa pendidikan, dan membuat mereka kehilangan waktu mengembangkan potensi yang berpeluang membantu dalam bidang mereka bekerja setelah dewasa. Perkawinan anak berdampak pada partisipasi tenaga kerja anak perempuan dan perempuan. Anak perempuan yang melangsungkan perkawinan pada usia dini memiliki kecenderungan untuk dikeluarkan dari sekolah atau dipaksa berhenti bersekolah oleh pihak keluarga. Anak perempuan yang sudah melangsungkan perkawinan mengalami beban yang tinggi dari pekerjaan rumah tangga, dan seringkali terisolasi serta tidak dapat mengakses pengetahuan dan keterampilan baru serta sumber daya yang memungkinkan dalam pengembangan ekonomi.

Perkawinan usia anak juga berdampak pada kesehatan terutama pada anak perempuan. Belum siapnya sistem reproduksi pada anak, minimnya pemahaman anak maupun keluarga terhadap resiko yang dialami oleh anak perempuan yang mengalami proses kehamilan dan kelahiran di usia remaja, juga dampak pada anak yang dilahirkan. Selain adanya implikasi kesehatan akibat kehamilan pada usia yang muda, perkawinan anak membatasi akses perempuan muda tersebut untuk bekerja produktif.

Dalam laporan World Bank yang berjudul *Economic Impacts of Child Marriage*, hal tersebut mungkin dapat disebabkan karena terganggunya pekerjaan yang seringkali terjadi karena proses persalinan dan tanggung jawab merawat anak dapat mempengaruhi jenis pekerjaan yang dapat dilakukan perempuan, memaksa mereka bekerja dengan gaji rendah dan berada di dalam situasi kerja yang lebih tidak stabil⁶⁰. Perkawinan anak membatasi posisi tawar perempuan di dalam rumah tangga dan ini mungkin juga berhubungan dengan keputusan untuk masuk angkatan kerja.

Dengan banyaknya dampak negatif dari perkawinan usia anak, tentu perlu langkah-langkah preventif yang dapat mengurangi kasus pernikahan usia anak kedepannya.

G. Kesimpulan

Hal-hal yang dapat disimpulkan dari pembahasan terkait Profil Anak Provinsi Papua Barat adalah :

1. Persentase penduduk usia anak (0-19 tahun) masih mendominasi struktur penduduk Provinsi Papua Barat dengan 35,93 persen, dengan piramida penduduk berbentuk genta/lonceng.
2. Permasalahan pendidikan di Provinsi Papua Barat masih berkaitan erat dengan rendahnya angka partisipasi sekolah masyarakat pada kelompok umur yang lebih tinggi. Permasalahan seperti belum meratanya fasilitas pendidikan, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan menjadi salah faktor yang dianggap masih sangat berpengaruh.
3. Persentase penduduk usia 10-17 yang termasuk dalam angkatan kerja dan bekerja di Provinsi Papua Barat termasuk dalam 10 provinsi tertinggi di Indonesia dengan persentase berturut-turut 13,82 persen dan 5,35 persen.

<https://papuabarat.bps.go.id>



3

Profil Usia Produktif

- A. Penduduk Usia Produktif : Motor Utama Pembangunan Papua Barat
- B. Meretas Jalan Menuju Papua Barat yang Aman, Sejahtera, dan Bermartabat
- C. Penduduk Usia Produktif menurut Kabupaten/Kota
- D. Kesimpulan



Penduduk menurut usia terbagi menjadi dua kelompok. Penduduk usia produktif adalah penduduk berusia 15-64 tahun, dan penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia 0-14 tahun dan lebih dari 64 tahun.

Profil Usia Produktif

Bonus demografi merupakan kondisi di mana peran penduduk usia produktif tengah berada di puncaknya, yang saat ini sedang dinikmati Indonesia, termasuk juga di Provinsi Papua Barat. Satu-satunya indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran bonus demografi ialah rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Rasio ketergantungan mencerminkan struktur umur penduduk, yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu penduduk usia produktif (15-64 tahun) dan penduduk usia nonproduktif. Dari definisi rasio ketergantungan tersebut jelas menunjukkan bahwa rasio ketergantungan yang menjadi indikator bonus demografi berhubungan dengan produktivitas.

Para ekonom mendefinisikan produktivitas sebagai rasio output terhadap input suatu aktivitas atau sektor ekonomi. Produktivitas juga didefinisikan sebagai jumlah output yang diproduksi oleh setiap unit input di mana output diukur dalam unit fisik. Produktivitas dapat diukur secara fisik dan ekonomi (nilai). Oleh karenanya, di dalam ilmu ekonomi kita mengenal istilah *marginal physical productivity*, mengukur secara fisik unit barang/jasa yang dihasilkan dan *marginal revenue productivity* yang menggunakan ukuran moneter (nilai).

Penjelasan di atas menjadi argumen para ekonom bahwa kemakmuran penduduk suatu negara ditentukan oleh tingkat produktivitasnya. Produktivitas tercermin dari seberapa besar nilai barang dan jasa yang bisa dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan produksi penduduk. Pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan standar hidup yang lebih baik hanya mungkin diwujudkan melalui peningkatan produktivitas. Tentunya, pengurangan kemiskinan membutuhkan upaya peningkatan produktivitas pada sektor yang menjadi sumber penghidupan penduduk miskin. Tingkat produktivitas merupakan determinan penting bagi peningkatan standar hidup penduduk. Kenaikan produktivitas berdampak pada peningkatan produksi yang kemudian dapat mendorong penurunan harga riil. Dampak berikutnya ialah akan terjadi kenaikan upah riil sehingga penduduk dapat meningkatkan kesejahteraannya.

A. Penduduk Usia Produktif : Motor Utama Pembangunan Papua Barat

Menurut teori pertumbuhan model Solow, pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi (Todaro & Smith, 2014: 138). Perubahan jumlah penduduk yang merupakan salah satu faktor produksi tentunya akan berpengaruh pada tingkat produktivitas suatu wilayah.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk usia produktif Provinsi Papua Barat berjumlah 797,3 ribu jiwa atau mencapai 70,3 persen dari total penduduk, dengan *dependency ratio* sebesar 42,2 persen. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan

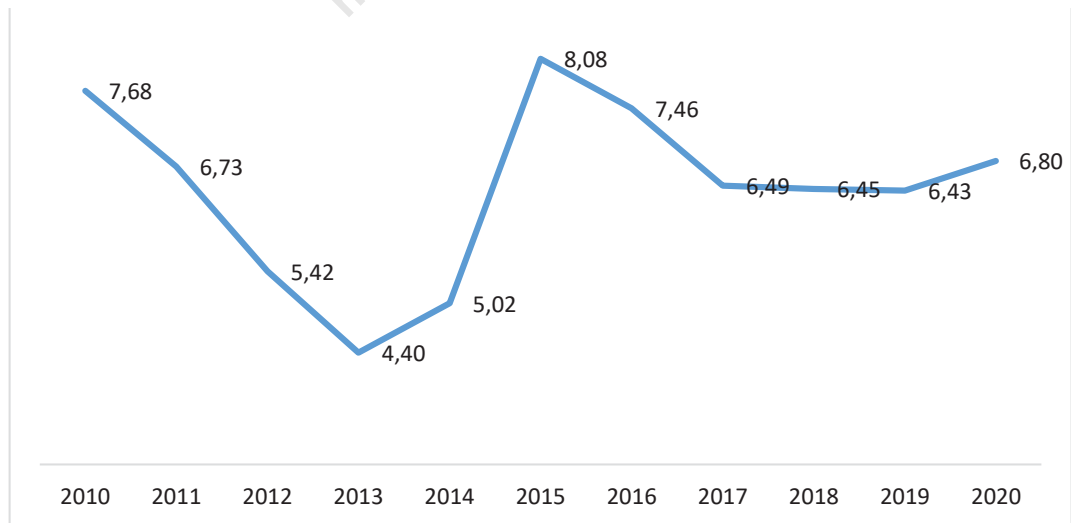
bahwa setiap 100 penduduk usia produktif Provinsi Papua Barat menanggung 42 hingga 43 orang usia non produktif. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk 2010 yang *dependency ratio*-nya mencapai 55,7 persen. Hal ini menunjukkan penurunan beban kelompok penduduk usia non produktif terhadap kelompok penduduk usia produktif.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Usia Produktif dan Non-Produktif Provinsi Papua Barat, 2010-2020

Kategori	2010	2020
(1)	(2)	(3)
Jumlah Penduduk Usia Non Produktif	272.100	336.757
Jumlah Penduduk Usia 0-14 Tahun	259.571	299.515
Jumlah Penduduk Usia 65+ Tahun	12.529	37.242
Jumlah Penduduk Usia Produktif	488.322	797.311
<i>Dependency Ratio</i>	55,72	42,23

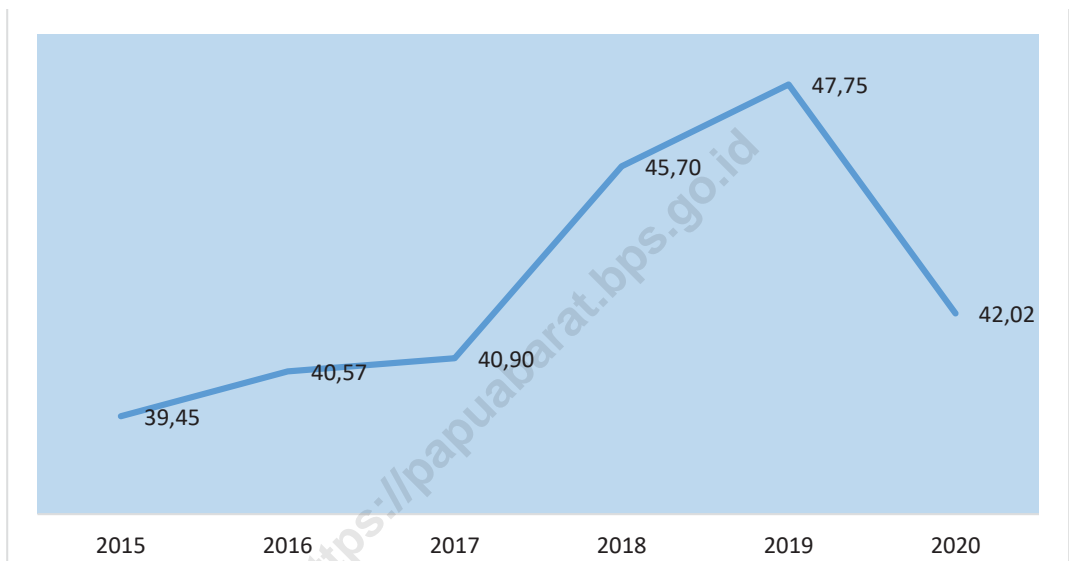
Keterangan/Sumber Tabel : Sensus Penduduk, BPS

Meski secara angka, beban yang penduduk usia non produktif yang ditanggung mengalami penurunan, hal ini tidak serta merta langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua Barat. Seperti teori Todaro & Smith (2014) yang dijelaskan sebelumnya bahwa yang mempengaruhi produktifitas adalah jumlah penduduk, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi, tentu besaran tenaga kerja dan lapangan usahadari pekerjaan juga berpengaruh terhadap tingkat produktifitas penduduk.



Gambar 1. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Papua Barat, 2010-2020

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Papua Barat dari tahun 2010 hingga tahun 2020 bernilai fluktuatif. Penurunan TPT dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa jumlah angkatan kerja usia produktif yang belum bekerja menurun. Jika membandingkan angka pada tahun 2010 dengan tahun 2020, terjadi sedikit penurunan pada TPT Provinsi Papua Barat, namun angka tersebut mengalami sedikit kenaikan jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2019,. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah terjadi pandemi covid-19 yang memicu menurunnya kondisi perekonomian, seiring dengan beragam sektor lapangan usaha yang terpaksa mengurangi kegiatan produksinya seperti usaha yang berkaitan dengan transportasi, pariwisata, dan akomodasi.



Gambar 2. Persentase Tenaga Kerja Sektor Formal Provinsi Papua Barat, 2015-2020

Berdasarkan hasil SAKERNAS, persentase tenaga kerja yang bekerja pada sektor formal terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi indikasi peningkatan kondisi tenaga kerja di Provinsi Papua Barat. Sektor pekerjaan formal memberikan kompensasi pekerja yang lebih baik dan terjamin. Sesuai dengan hak karyawan yang tercantum dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pekerja berhak memperoleh hak dasar seperti memperoleh upah yang layak, hak untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dari perusahaan tanpa diskriminasi, dan hak untuk mendapatkan pelatihan kerja untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja. Dengan hak-hak dasar yang dijamin undang-undang, tentu lebih mudah bagi tenaga kerja untuk memperjuangkan pemenuhan hak-haknya. Berbeda dengan tenaga kerja di sektor informal. Tidak adanya payung hukum yang kuat yang melindungi hak pekerja sektor informal, sedikit banyak berpengaruh pada pemenuhan hak tenaga kerja yang ada. Pembayaran upah di bawah batas upah minimin regional dan jam kerja yang berlebih tanpa kompensasi merupakan dua hal yang lumrah terjadi pada pekerjaan sektor informal. Dengan tidak adanya tuntutan untuk pemenuhan kompensasi pekerja, tentu membuat pekerja sektor informal lebih riskan mengalami permasalahan secara ekonomi.

B. Meretas Jalan Menuju Papua Barat yang Aman, Sejahtera, dan Bermartabat

Demi mencapai kondisi Papua Barat yang aman, sejahtera, dan bermartabat, tentu memerlukan peran aktif dari semua pihak, baik penduduk maupun pemerintah. Penduduk usia produktif sebagai motor penggerak, tentunya tidak dapat berjalan sendiri demi mencapai tujuan tersebut. Diperlukan partisipasi aktif dari pemerintah dan masyarakat agar penduduk usia produktif dapat memaksimalkan potensi dirinya.

Masyarakat pada umumnya belum mengenal baik arti kesejahteraan masyarakat. Masyarakat cenderung mengartikan kesejahteraan masyarakat semata-mata sebagai hal yang berkaitan dengan materi atau uang dan cara meningkatkan kesejahteraan adalah dengan kegiatan pemberian bantuan barang dan uang kepada kelompok masyarakat kesejahteraan sosial adalah sebagai kegiatan “pemberdayaan” masyarakat agar masyarakat menjadi lebih produktif dengan berbagai cara diantaranya melalui pemberian modal usaha, penyediaan kredit mikro, pelatihan keterampilan usaha ekonomi produktif dan lain-lain.

Kesejahteraan masyarakat di bidang sosial pada dasarnya merupakan keadaan sosial yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat jasmani, rohani dan sosial sesuai dengan hakekat dan martabat manusia untuk dapat mengatasi berbagai masalah sosial yang dihadapi diri, keluarga dan masyarakatnya untuk berkembang menjadi lebih baik. Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM bangsa Indonesia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan.

Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kecenderungan primordialisme dan eksklusivisme yang dapat mengancam tatanan hidup bangsa Indonesia. Dimana kondisi demikian apabila diabaikan maka akan mengarah pada terjadinya konflik horizontal yang selanjutnya akan dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang sangat merugikan. Pembangunan kesejahteraan bidang sosial oleh pemerintah di seluruh wilayah Indonesia memerlukan adanya suatu strategi yang sesuai dengan kondisi wilayah yang meliputi semua aspek potensi wilayah suatu daerah. Pentingnya perencanaan dan strategi ini dimaksudkan agar konsep kesejahteraan yang merupakan basis historis dan teoritis pembangunan kesejahteraan sosial relatif dapat berjalan secara maksimal.

Berbagai aspek yang mempengaruhi peluang penduduk usia produktif untuk ikut aktif mewujudkan Papua Barat yang aman, sejahtera, dan bermartabat adalah aspek pendidikan, miskin atau rehabilitasi masyarakat yang dilakukan di panti-panti sosial seperti panti jompo, panti asuhan, panti karya wanita dan lain-lain. Padahal esensi pembangunan Dari sisi pendidikan, kualitas penduduk usia produktif menunjukkan adanya peningkatan. Data susenas menunjukkan bahwa angka buta huruf penduduk usia produktif pada tahun 2020 jauh lebih rendah dari kondisi 2010. Hal ini merupakan salah satu dampak dari



Demi mencapai kondisi masyarakat sejahtera, beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah aspek pendidikan, kesehatan, dan konsumsi masyarakat.

program wajib belajar, sekolah paket, dan pemberian bantuan pendidikan pada masyarakat sehingga mengurangi tingkat keengganan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan. Partisipasi sekolah penduduk usia produktif juga mengalami peningkatan dengan rata-rata lama sekolah yang lebih lama hampir 1 tahun dibanding kondisi tahun 2010 yaitu dari 6,77 tahun pada tahun 2010 menjadi 7,60 pada tahun 2020.

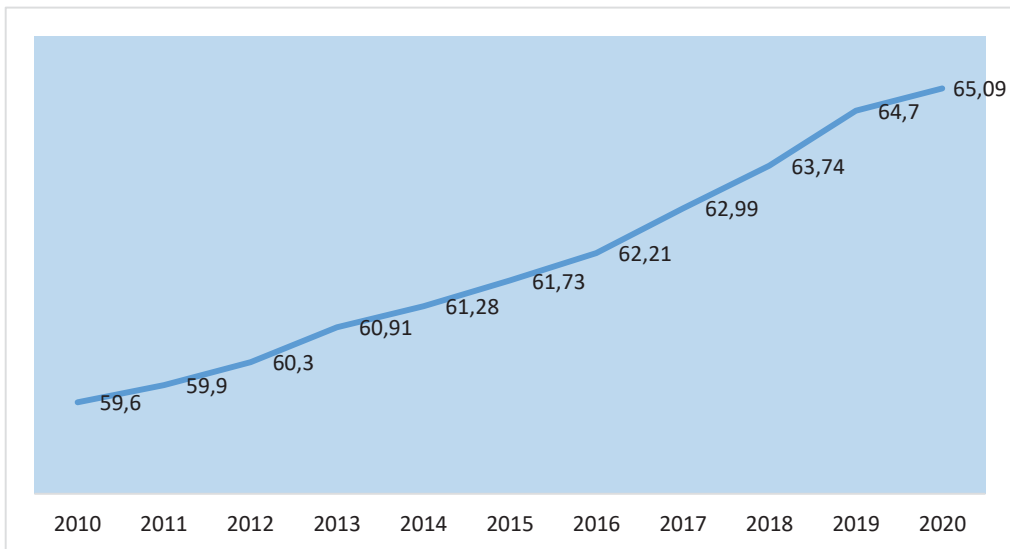
Hal lain yang dapat dilihat untuk mengukur perkembangan kondisi kesejahteraan penduduk adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang memperhatikan aspek pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran atau konsumsi penduduk.



IPM Provinsi Papua Barat bernilai 65,09 pada tahun 2020 dan masuk dalam kategori sedang. Perlu kerjasama semua pihak untuk membantu Papua Barat segera mencapai nilai IPM 70 dan masuk dalam provinsi dengan kategori IPM tinggi.

IPM Provinsi Papua Barat, pada Gambar 3 terlihat mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dapat diartikan bahwa tren indikator penyusun IPM juga mengalami kenaikan dari tahun 2010 hingga tahun 2020, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun konsumsi masyarakat. Meski kondisi pandemi covid-19 yang dimulai pada awal tahun 2020 tentu berpengaruh signifikan pada aspek pengeluaran masyarakat. IPM Provinsi Papua Barat mencapai 65,09 pada tahun 2020, atau masuk dalam kategori IPM sedang, meningkat dari 59,60 pada tahun 2010 yang termasuk kategori IPM rendah. Hal ini menandakan bahwa selama 10 tahun terakhir kesejahteraan masyarakat terus terwujud, secara perlahan namun pasti, dan penting untuk semua pihak mengawal agar

dalam beberapa tahun mendatang, nilai IPM Provinsi Papua Barat bisa menyentuh angka 70 yang berarti Provinsi Papua Barat telah naik dalam kategori nilai IPM tinggi, yang tentunya menunjukkan peningkatan kesejahteraan pada masyarakat.



Gambar 3. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat, 2010-2020

Menurut Triwidodo & Hidayat (1991) tenaga kerja di sektor informal cenderung kesulitan dalam mengembangkan kemampuan maupun skala usahanya. Hal ini dikarenakan beragam aspek yang jika dilihat, sektor informal tentu masih perlu bekerja sangat keras agar dapat bersaing dengan sektor formal. Di antaranya adalah pada hal-hal seperti modal usaha baik berupa aset lancar maupun aset tetap, keterbatasan akses terhadap akses informasi pengembangan yang berkaitan dengan *supply* dan *demand* pasar terhadap produk barang atau jasa yang disediakan.

Beragam permasalahan yang muncul pada tenaga kerja di sektor informal bukan berarti kita harus mendorong seluruh tenaga kerja harus beralih ke sektor formal. Kendala seperti minimnya pendidikan dan pelatihan, merupakan kendala yang dapat terbantu sementara dengan adanya sektor informal karena sektor informal cenderung tidak terlalu kaku dalam menerapkan standar dalam proses perekrutannya tenaga kerjanya seperti batasan umur, tingkat pendidikan, dan kemampuan yang dimiliki. Berbeda dengan sektor formal yang cenderung memiliki standar yang baku mengenai kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan.

Demi mendorong peningkatan persentase penduduk usia produktif yang bekerja di sektor formal agar dapat tercapai tingkat produktifitas yang lebih optimal. Penduduk usia produktif sebagai motor penggerak menuju kesejahteraan tentu memerlukan beragam kemampuan guna memenuhi tuntutan perannya. Optimalisasi pemanfaatan bonus demografi membutuhkan kualitas yang baik dari penduduk usia produktif. Pendidikan dan kesehatan merupakan dua hal mendasar yang penting dalam menunjang optimalisasi potensi penduduk usia produktif. Dengan pendidikan yang lebih baik dan pelatihan keterampilan yang lebih beragam, tentu memberikan peluang yang lebih luas dan beragam bagi penduduk usia produktif untuk memilih jenis pekerjaan yang diinginkan dan sesuai spesifikasi, juga mengurangi kemungkinan penduduk usia produktif untuk bekerja di sektor informasl. Aspek kesehatan juga penting diperhatikan bagi penduduk usia produktif. Semakin baik kondisi kesehatan masyarakat tentu memperkecil kemungkinan masyarakat untuk sakit dan meningkatkan Usia Harapan Hidup penduduk, sehingga penduduk usia produktif memiliki kemungkinan untuk hidup hingga melewati batas usia produktifnya.

C. Penduduk Usia Produktif Menurut Kabupaten/Kota

Untuk dapat memperoleh gambaran terkait kondisi penduduk usia produktif di kabupaten/kota, tentu perlu melihat sebaran penduduk usia produktif. Perbedaan jumlah penduduk yang cukup signifikan antar kabupaten/kota tentu juga berpengaruh pada jumlah dan persentase penduduk usia produktif di masing-masing wilayah di Provinsi Papua Barat.

Pada Tabel 2, dapat kita lihat sebaran penduduk usia produktif dan *dependency ratio* di masing-masing kabupaten/kota. Berdasarkan tabel 2, terlihat bahwa wilayah dengan persentase penduduk usia produktif tertinggi adalah Kabupaten Pegunungan Arfak dengan persentase mencapai 82,34 persen, dan wilayah dengan persentase terendah adalah Kabupaten Teluk Wondama dengan nilai 65,06 persen. Seiring dengan besarnya persentase penduduk usia produktif, tentu semakin kecil persentase penduduk usia non produktifnya yang tentunya berpengaruh juga pada kecilnya nilai *dependency ratio* di wilayah tersebut. Nilai *dependency ratio* Kabupaten Pegunungan Arfak merupakan yang terkecil dengan nilai 21,45 atau dapat dikatakan bahwa setiap 100 penduduk usia

produktif di Kabupaten Pegunungan Arfak menanggung 21 hingga 22 penduduk usia non produktif.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Usia Produktif Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat, 2020

Kabupaten/Kota	Penduduk Usia Produktif	Penduduk Usia Non Produktif	Persentase penduduk usia produktif terhadap total penduduk	Dependency Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fakfak	56.122	29.075	65,87	51,81
Kaimana	42.963	19.293	69,01	44,91
Teluk Wondama	27.095	14.549	65,06	53,70
Teluk Bintuni	63.527	23.556	72,95	37,08
Manokwari	132.603	60.060	68,83	45,29
Sorong Selatan	35.740	16.729	68,12	46,81
Sorong	83.342	35.337	70,22	42,40
Raja Ampat	42.196	21.945	65,79	52,01
Maybrat	20.381	7.998	71,82	39,24
Tambrau	31.989	11.002	74,41	34,39
Manokwari Selatan	25.926	10.023	72,12	38,66
Pegunungan Arfak	31.458	6.749	82,34	21,45
Kota Sorong	203.969	80.441	71,72	39,44

Sumber Tabel : Sensus Penduduk 2020, BPS

Kondisi penduduk usia produktif yang tinggi dan angka *dependency ratio* yang kecil tidak serta merta memberikan informasi mengenai kondisi penduduk usia produktif berkaitan dengan tingkat pengangguran, lapangan usaha pekerjaan utama, dan informasi lain yang berkaitan dengan produktifitas ekonomi penduduk usia produktif. Dua indikator yang dapat memberikan gambaran lebih rinci mengenai kondisi ketenagakerjaan di kabupaten/kota adalah Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja memberikan gambaran terkait persentase angkatan kerja terhadap total penduduk suatu wilayah. Adapun yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, memiliki pekerjaan namun sementara sedang tidak bekerja, dan juga mereka yang menganggur. Penduduk

usia 15 tahun ke atas yang masih bersekolah, memutuskan untuk sepenuh waktu mengurus rumah tangga, ataupun mengurus kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi tidak termasuk dalam angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memberikan informasi mengenai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja pada tahun tersebut.

Tabel 3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota, 2020

Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
(1)	(2)	(3)
Fakfak	68.66	11.45
Kaimana	74.68	6.90
Teluk Wondama	75.83	4.43
Teluk Bintuni	69.44	8.58
Manokwari	70.29	7.47
Sorong Selatan	70.44	3.69
Sorong	64.21	3.29
Raja Ampat	71.83	2.73
Maybrat	73.43	2.46
Tambrauw	78.24	2.26
Manokwari Selatan	82.74	2.43
Pegunungan Arfak	95.37	1.62
Kota Sorong	62.77	9.93

Sumber Tabel : Survei Angkatan Kerja Nasional, BPS

Berdasarkan Tabel 3, terlihat bahwa wilayah dengan TPAK tertinggi adalah Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai 95,37 persen, atau dapat diartikan bahwa lebih dari 95 persen penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Pegunungan Arfak ikut berperan aktif dalam perekonomian baik sebagai seseorang yang bekerja maupun seseorang yang sedang mencari kerja, dan wilayah dengan TPAK terendah adalah Kabupaten Sorong dengan nilai 64,21 persen. Perbedaan kondisi wilayah dan karakteristik penduduk, memegang peranan dalam TPAK suatu wilayah. Wilayah dengan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan mudah diakses seperti di wilayah perkotaan ataupun wilayah dekat dengan perkotaan

seperti Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, dan Kota Sorong cenderung akan memiliki TPAK yang lebih rendah karena penduduk usia 15 tahun ke atas masih banyak yang melanjutkan bersekolah, dan pada wilayah dengan fasilitas pendidikan yang lebih terbatas seperti Pegunungan Arfak, akan cenderung menyelesaikan pendidikan seadanya karena terkendala jarak akses ke fasilitas pendidikan. Tentu faktor budaya peran dalam rumah tangga juga berpengaruh dalam penghitungan TPAK. Pada beberapa wilayah di Indonesia, masih ada kecenderungan pola pikir yang mengatakan bahwa tugas laki-laki adalah mencari nafkah dan tugas perempuan mengurus rumah, sedangkan di kebanyakan wilayah di Papua Barat, terutama di wilayah yang kaya akan sumber daya alam, baik laki-laki maupun perempuan, seluruhnya membantu bekerja di ladang, kebun, ataupun melaut. Tentu hal ini berpengaruh dalam penentuan jumlah penduduk yang terlibat sebagai angkatan kerja.

Wilayah dengan TPT tertinggi adalah Kabupaten Fakfak dengan nilai 11,45 persen, dan yang terendah adalah Kabupaten Pegunungan Arfak dengan nilai 1,62 persen. Tingginya TPT suatu wilayah tentu perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. TPT dapat dipengaruhi beragam faktor, dimulai dari keterbatasan lapangan pekerjaan di wilayah tersebut, tidak ada atau rendahnya akses bagi masyarakat untuk mendapat bantuan modal untuk memulai usaha, maupun ketidaksesuaian kemampuan masyarakat terhadap permintaan atau syarat tenaga kerja yang dibutuhkan.

Solusi mengatasi ketimpangan antara kemampuan masyarakat dengan permintaan dari pihak yang membuka lowongan kerja salah satunya dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan. Salah satu wilayah yang telah membuka kerjasama pelatihan untuk meningkatkan daya saing penduduk adalah Kabupaten Teluk Bintuni. Kabupaten Teluk Bintuni merupakan wilayah penghasil gas alam, dengan potensi sumber daya alam tersebut tentu bukan perusahaan kecil yang kan masuk ke wilayahnya. Dengan memperhatikan potensi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan pengelola gas alam, pemerintah daerah menjalin kerjasama dengan perusahaan minyak dan gas untuk memberikan pelatihan kepada putra daerah agar dapat bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari luar Kabupaten Teluk Bintuni. Tentu hal ini dapat dicontoh oleh pemerintah daerah lain sebagai usaha mengurangi TPT dan meningkatkan daya saing penduduknya.

D. Kesimpulan

Persentase penduduk usia produktif Provinsi Papua Barat mencapai lebih dari 70 persen pada tahun 2020, hal ini menjadi indikasi bahwa penduduk usia produktif mendominasi struktur penduduk Provinsi Papua Barat.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk, penting untuk memaksimalkan potensi penduduk usia produktif yang merupakan bagian dari fenomena bonus demografi. Peningkatan kompetensi penduduk usia produktif melalui pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu cara dalam memaksimalkan potensi tersebut.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Papua Barat bernilai 69,55 persen. Yang berarti 69,55 persen dari total penduduk di Provinsi Papua Barat terlibat secara aktif dalam perekonomian baik dengan bekerja maupun yang sementara masih mencari pekerjaan. Kabupaten dengan nilai TPAK tertinggi adalah Kabupaten Pegunungan Arfak, dan yang terendah adalah Kabupaten Sorong.



4

Profil Penduduk Lanjut Usia

- A. Profil Demografi Lansia di Papua Barat
- B. Papua Barat menuju Aging Population
- C. Sebaran Penduduk Lansia di Papua Barat menurut Kabupaten/ Kota
- D. Perlindungan dan Pemberdayaan Lansia Papua Barat
- E. Kesimpulan



Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas (UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia)

Profil Penduduk Lanjut Usia

Penduduk lanjut usia (lansia) menurut UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia didefinisikan sebagai seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas. Penduduk lansia merupakan salah satu kelompok sasaran pembangunan yang menjadi perhatian pemerintah. Hal tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah dan proporsi penduduk lansia. Peningkatan jumlah dan proporsi penduduk lansia tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bonus demografi kedua. Kondisi tersebut dapat tercapai dengan syarat tersedianya lansia yang sejahtera dan produktif dalam jumlah yang cukup. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan dan program kebijakan di bidang kesejahteraan lanjut usia yang didukung oleh data dan informasi yang memadai. Dengan tersedianya data tersebut maka akan sangat membantu pemerintah dalam menentukan skala prioritas dan sasaran serta target pembangunan.

A. Profil Demografi Lansia di Papua Barat

1. Struktur Penduduk Lansia Papua Barat

Berdasarkan Tabel 5.1, diketahui bahwa pada tahun 2020, secara umum persentase penduduk lansia laki-laki di Papua Barat lebih besar daripada persentase penduduk lansia perempuan, yaitu sebesar 5,96 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2020, terdapat lebih banyak penduduk lansia laki-laki dibandingkan penduduk lansia perempuan di Papua Barat. Menurut kelompok umur, penduduk lansia terbagi menjadi lansia muda (60-69 tahun), lansia madya (70-79 tahun), dan lansia tua (80 tahun keatas) dengan persentase secara berturut-turut sebesar 4,24 persen, 1,36 persen, dan 0,22 persen.

Tabel 1. Persentase Penduduk Lansia menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Papua Barat, 2020

Jenis Kelamin	Kelompok Umur			Lansia (60+)
	Lansia Muda (60-69 tahun)	Lansia Madya (70-79 tahun)	Lansia Tua (80+)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-Laki (L)	4,35	1,40	0,21	5,96
Perempuan (P)	4,12	1,32	0,22	5,66
Papua Barat	4,24	1,36	0,22	5,82

Sumber Tabel : BPS, Sensus Penduduk 2020

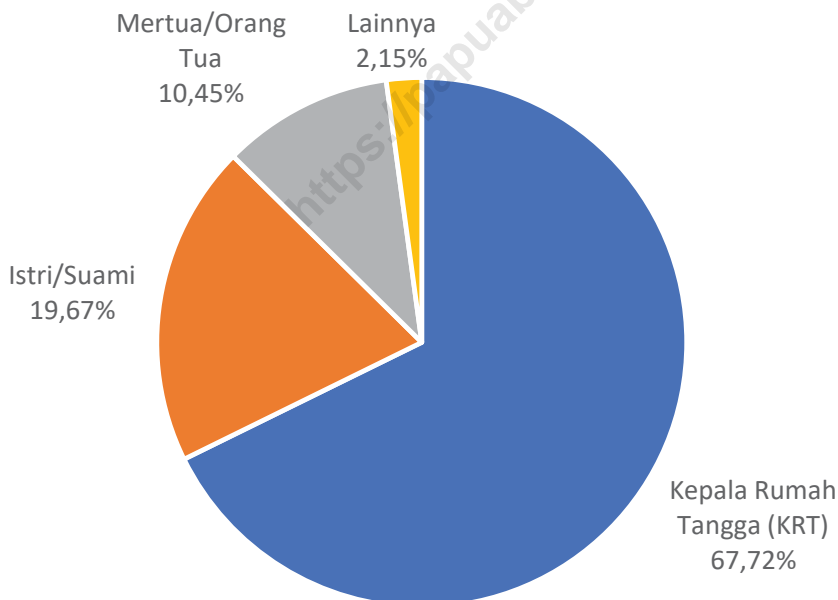
2. Rasio Ketergantungan Penduduk Lansia

Peningkatan jumlah penduduk lansia merupakan cerminan dari peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH) di suatu wilayah. Implikasinya adalah terjadi perubahan struktur penduduk, sehingga akan berdampak pada angka beban ketergantungan penduduk lansia (*old dependency ratio*). Angka tersebut menunjukkan tingkat ketergantungan penduduk lansia terhadap penduduk usia produktif. Hasil dari SP2020 menunjukkan bahwa angka rasio ketergantungan penduduk lansia di Papua Barat pada tahun 2020 adalah 8,59 poin. Hal tersebut berarti bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 8 orang penduduk lansia.

3. Peranan Penduduk Lansia dalam Rumah Tangga

Setiap orang yang tinggal di dalam suatu rumah tangga memiliki peran khusus yang mungkin berbeda antara satu dengan yang lain. Salah satu peran terpenting dalam suatu rumah tangga adalah kepala rumah tangga (KRT). KRT adalah orang yang memiliki tanggung jawab dalam menentukan kelangsungan dan keberadaan rumah tangga.

Selain harus bertanggung jawab secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggotanya, KRT juga harus mengatur dan memimpin anggota rumah tangganya, serta berperan sebagai pengambil keputusan. Pada kenyataan, ternyata peran tersebut masih banyak dipegang oleh penduduk lansia yang seharusnya dapat menikmati hari tuanya tanpa beban yang berat.

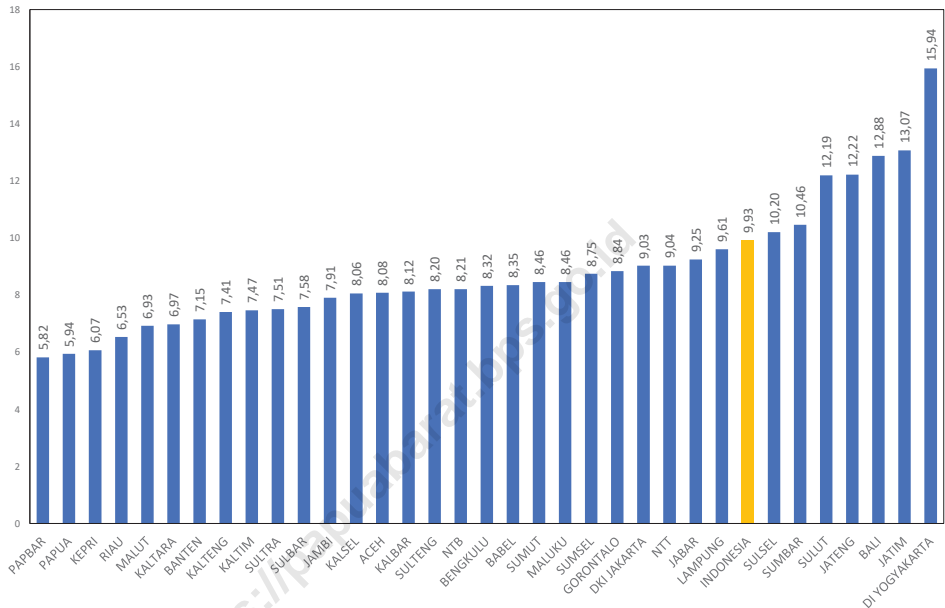


Gambar 1. Persentase Penduduk Lansia Provinsi Papua Barat menurut Status Keanggotaan Rumah Tangga, 2020

Berdasarkan Gambar 1, pada tahun 2020 sebagian besar penduduk lansia di Papua Barat masih memegang peranan penting dalam rumah tangga. Hal ini terlihat dari persentase penduduk lansia yang berstatus KRT mencapai nilai 67,72 persen.

B. Papua Barat menuju *Ageing Population*

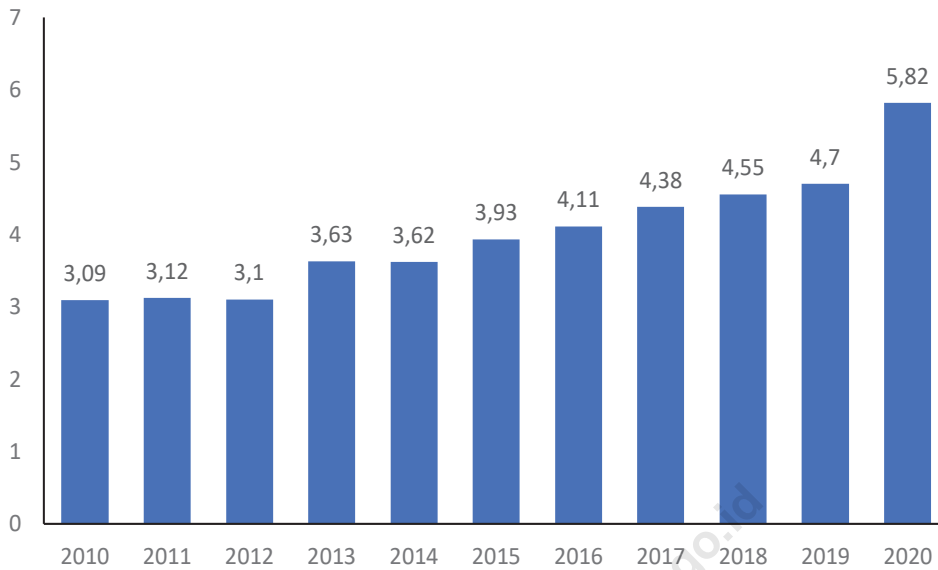
Suatu wilayah dikatakan memiliki struktur penduduk tua apabila struktur penduduk lansianya telah mencapai 7 persen ke atas (Kemenkes, 2017). Menganalogikan pada batasan tersebut, maka Papua Barat belum masuk dalam kategori tersebut. Berdasarkan hasil SP2020, persentase lansia di Papua Barat yaitu sebesar 5,82 persen, menjadikan Papua Barat sebagai provinsi dengan persentase lansia terendah di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Persentase Lansia terhadap Jumlah Penduduk menurut Provinsi

Walaupun Papua Barat belum memasuki struktur penduduk lansia, tetapi masalah yang berkaitan dengan penduduk lansia tidak boleh diabaikan begitu saja, karena bagaimanapun juga lansia adalah bagian dari penduduk yang perlu perhatian lebih dibanding kelompok usia muda, baik terkait hal yang berhubungan dengan kesehatan maupun produktifitasnya. Semakin sehat dan sejahtera penduduk lansia di suatu wilayah maka semakin maju wilayah tersebut. Jika kesehatan penduduk lansia baik, maka UHH-nya tentu juga akan meningkat. Dengan demikian kesehatan dan kesejahteraan penduduk lansia menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

Berdasarkan Gambar 3, persentase penduduk lansia di Papua Barat menunjukkan peningkatan dari bernilai 3,09 persen pada tahun 2010 menjadi 5,82 persen pada tahun 2020. Meski secara persentase terhadap total penduduk Provinsi Papua Barat nilainya masih termasuk kecil, hal ini memperlihatkan bahwa persentase penduduk lansia di Papua Barat terus mengalami peningkatan, yang mengindikasikan Provinsi Papua Barat semakin mendekati *ageing population*.



Gambar 3. Persentase Penduduk Lansia terhadap Jumlah Penduduk Provinsi Papua Barat, 2010-2022

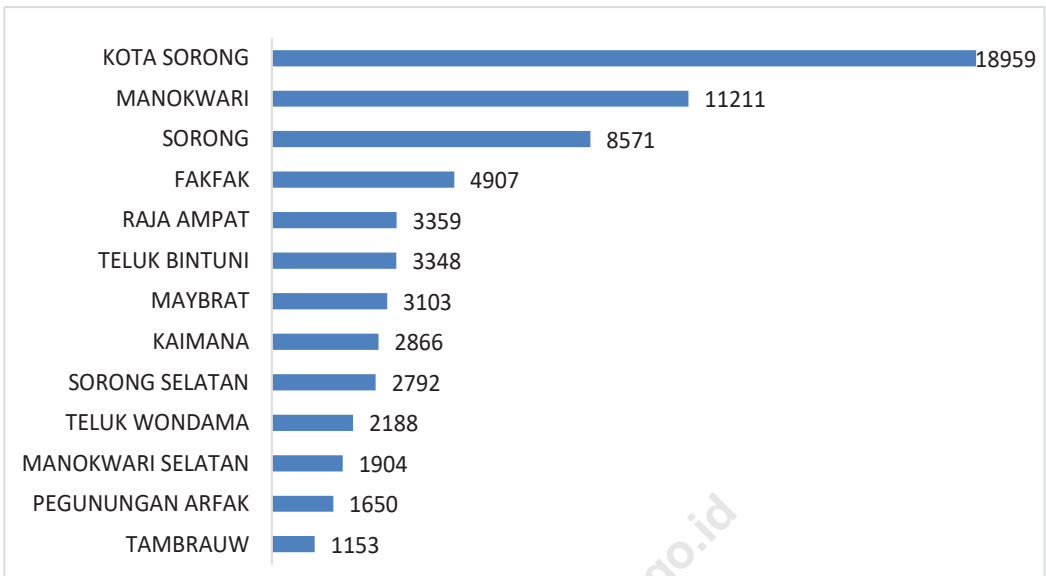
Tentu kondisi struktur penduduk Provinsi Papua Barat yang didominasi penduduk lansia tidak akan terjadi hanya dalam waktu satu atau dua tahun ke depan. Masih cukup waktu bagi pemerintah daerah untuk mempersiapkan diri dalam menyusun kebijakan terkait penduduk lansia yang mungkin dalam beberapa dekade ke depan secara persentase akan sama atau bahkan mungkin lebih besar dibanding persentase penduduk usia produktif, yang tentunya akan berdampak besar pada rasio ketergantungan penduduk secara produktifitas nantinya.

C. Sebaran Penduduk Lansia di Papua Barat menurut Kabupaten/ Kota

Untuk dapat mengetahui lebih detail terkait kondisi penduduk di Papua Barat, tentunya perlu untuk melihat bagaimana sebaran penduduk lansia di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, kabupaten/kota dengan penduduk usia lanjut terbanyak adalah kabupaten/kota dengan penduduk terbanyak yaitu Kota Sorong dengan jumlah penduduk usia 60 tahun ke atas berjumlah 18.959 jiwa, dan Kabupaten Manokwari dengan jumlah 11.211 jiwa. Data jumlah penduduk usia lanjut pada masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada Gambar 2.



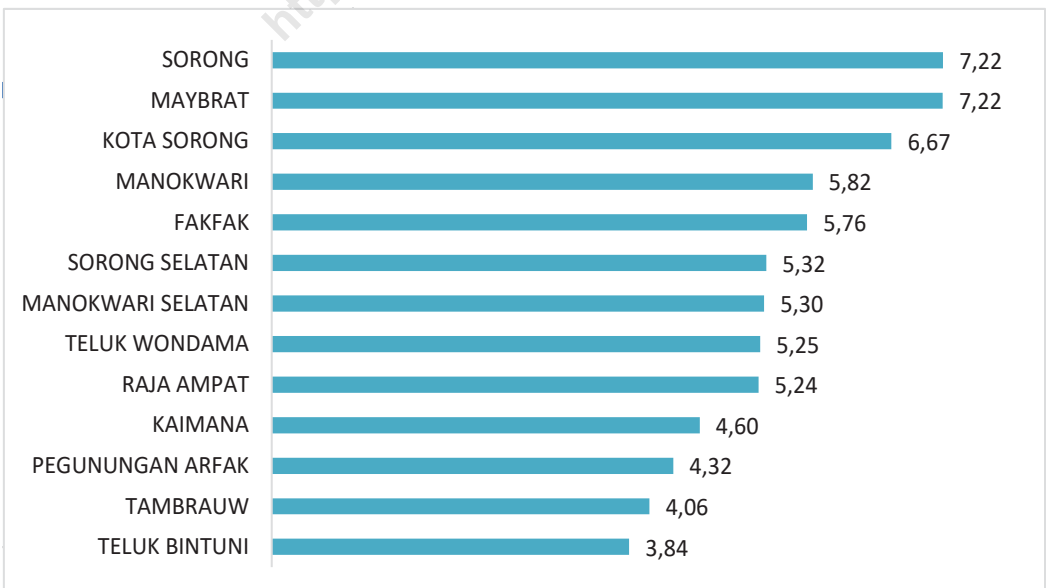
Kota Sorong merupakan wilayah dengan jumlah penduduk usia lanjut terbanyak yaitu 18.959 jiwa, atau mencapai 6,67 persen terhadap total penduduknya



Gambar 2. Jumlah Penduduk Lansia menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat, 2020

Meski secara jumlah, Kota Sorong merupakan wilayah dengan penduduk usia lanjut terbanyak, namun secara persentase terhadap total penduduknya, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Maybrat yang memiliki persentase tertinggi, melewati angka 7 persen.

Pada Gambar 3 terlihat bahwa persentase jumlah lansia terhadap jumlah penduduk Kabupaten Sorong dan Kabupaten Maybrat mencapai angka 7,22 persen. Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari, dua wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, memiliki persentase masing-masing 6,67 dan 5,30 persen.



Gambar 3. Persentase Penduduk Lansia terhadap Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat, 2020

Kabupaten Teluk Bintuni merupakan wilayah dengan persentase penduduk usia lanjut terendah di Provinsi Papua Barat. Dengan kondisi Teluk Bintuni sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak keempat, yang tentu beriringan dengan jumlah penduduk usia lanjut yang cukup banyak, tidak serta merta menjadikan Teluk Bintuni sebagai salah satu Kabupaten berstruktur penduduk tua.

D. Perlindungan dan Pemberdayaan Lansia di Papua Barat

Jika melihat perkembangan persentase penduduk usia lanjut terhadap jumlah penduduk dari tahun ke tahun terlihat bahwa ke depannya, angka tersebut akan terus meningkat. Permasalahan kondisi penduduk usia lanjut yang lebih rentan terkena permasalahan kesehatan akibat usia yang tidak lagi muda dan kondisi tubuh yang tak lagi prima, menurunnya produktifitas yang merupakan dampak kebijakan usia pensiun di bidang pekerjaan ataupun tuntutan pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga yang tak mungkin dilakukan oleh penduduk lanjut usia, maupun permasalahan kesejahteraan lansia saat dalam keluarga tidak terdapat anggota rumah tangga lain yang mampu menanggung pengeluaran kebutuhan dasar rumah tangga menjadi kasus nyata dan umum terjadi. Demi menghadapi permasalahan yang akan timbul di kemudian hari dengan perkembangan struktur penduduk, tentu pemerintah perlu memberikan perhatian khusus pada kondisi penduduk usia lanjut yang ada di wilayah Papua Barat.

Pada hampir semua budaya, keluarga dikonstruksikan sebagai satu atau lebih kumpulan keluarga inti yang saling berhubungan darah, yang hidup bersama dalam satu rumah (Haviland, 1985). Dalam kebudayaan masyarakat timur seperti negara-negara di Asia, termasuk Indonesia, posisi penduduk usia lanjut memiliki peranan penting karena dalam sebuah keluarga seseorang yang lebih tua akan cenderung dijadikan panutan dan sebagai tempat mencari pertimbangan ketika generasi yang lebih muda menghadapi masalah. Lansia dianggap memiliki kelebihan, keahlian, dan pengalaman yang lebih banyak sehingga dianggap mampu untuk memberikan jalan keluar dalam menghadapi urusan dan permasalahan dalam keluarga.

Pada banyak kasus yang umum terjadi, penduduk usia lanjut juga ikut berperan aktif dalam mengasuh cucu-cucunya di rumah, sebagai pihak yang mewakili orang tua yang sibuk bekerja.. Menurut Kodaruddin dan Apsari (2019), motivasi lansia dalam merawat cucu-cucunya, diantaranya adanya kepedulian terhadap kesejahteraan anaknya, rasa tanggung jawab sebagai orang tua dalam mendukung anaknya, keinginan untuk mengisi waktu luangnya, serta adanya ketidakpercayaan jika cucu diasuh pihak selain keluarga. Di sisi lain, sebagian lansia juga masih harus menanggung beban sebagai pencari nafkah keluarga, bahkan ada yang menjadi tulang punggung keluarga. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fitri dan Basri (2012), faktor utama yang mendorong penduduk usia lanjut tetap bekerja karena kondisi perekonomian keluarga. Dengan beragamnya peran penduduk usia lanjut baik di dalam lingkup keluarga, maupun masyarakat, tentu penting untuk memastikan penduduk usia lanjut memperoleh kualitas hidup yang sama baiknya dengan penduduk kelompok umur lainnya.

Merujuk pada UU No 13 Tahun 1998 mengenai Kesejahteraan Lansia dan UU No 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial secara tegas menerangkan bahwa semua warga negara tanpa terkecuali memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan

sosial, termasuk lansia. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan penduduk usia lanjut merumuskan bahwa lansia tangguh adalah seseorang atau kelompok lansia yang sehat secara fisik, sosial, mental, aktif, produktif dan mandiri yang dipengaruhi oleh tujuh dimensi yakni, dimensi spiritual, intelektual, fisik, emosional, sosial kemasyarakatan, profesional, vokasional, dan lingkungan.

Berbagai program bantuan sosial bagi lansia telah diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Sebagai contoh Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Kementerian Sosial yang diantaranya terdapat kriteria bagi lansia. Selain itu, ada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang menggantikan program subsidi beras menjadi uang melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dapat dicairkan setiap bulannya. KKS dikeluarkan pemerintah sebagai penyaluran bansos dan subsidi. Di bidang kesehatan, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memberikan prioritas bagi lansia.

Selain program nasional yang diterapkan pemerintah pusat, pemerintah daerah tentu menyiapkan program lain guna menunjang perwujudan kesejahteraan lansia yang diamanatkan undang-undang. Beberapa program yang disiapkan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup penduduk usia lanjut khususnya di Provinsi Papua Barat salah satunya adalah Program Afiriasi Perlindungan Orang Asli Papua yang target programnya adalah mendukung perbaikan gizi dan kesejahteraan Orang Asli Papua, khususnya anak-anak usia di bawah lima tahun dan penduduk usia lanjut. Program lain yang dilaksanakan dalam lingkup yang lebih kecil dilakukan di Kabupaten Teluk Bintuni berupa biaya berobat gratis bagi penduduk Kabupaten Teluk Bintuni dengan memanfaatkan anggaran subsidi kesehatan. Program ini mirip dengan sistem JKN yang digunakan secara nasional di Indonesia, yang berbeda penduduk Kabupaten Teluk Bintuni tidak diharuskan memiliki kartu anggota seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk berobat atau melakukan pemeriksaan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat 1 milik pemerintah seperti puskesmas maupun puskesmas pembantu. Pada beberapa kasus, biaya pengobatan dan pemeriksaan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) juga dapat dibebaskan biayanya.

E. Kesimpulan

Struktur penduduk Provinsi Papua Barat mulai beralih dari yang pada tahun 2010 masih didominasi penduduk usia muda, menjadi didominasi oleh penduduk usia produktif pada tahun 2020. Dengan persentase penduduk usia lanjut telah melewati angka 5 persen, dalam beberapa tahun mendatang, Papua Barat akan mengalami perubahan menjadi struktur penduduk tua, yang mana merupakan kondisi ketika persentase penduduk usia lanjut terhadap total seluruh penduduk telah melewati angka 7 persen.

Banyaknya peran penduduk usia lanjut dalam keluarga maupun masyarakat, kerta kaitannya dengan kesejahteraan penduduk usia lanjut. Permasalahan kesehatan yang umum terjadi, juga tingginya persentase penduduk usia lanjut yang masih harus secara aktif ikut serta mengurus rumah tangga baik secara fisik berupa tenaga, secara mental dengan memberikan nasihat, serta secara ekonomi dengan turut serta mencari nafkah, bukan hal asing terjadi di Indonesia, termasuk di

Provinsi Papua Barat.

Peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk usia lanjut sangat penting. Berbagai kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk usia lanjut perlu seperti pemberian bantuan sosial, penyediaan fasilitas penunjang kesehatan untuk lansia seperti posyandu lansia penting untuk dilanjutkan dan dilakukan evaluasi secara rutin, untuk memastikan ketepatan arah sasaran program dan dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut.

<https://papuabarat.bps.go.id>

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik RI, PUSKAPA, dan UNICEF. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Diakses pada 12 Mei 2022 melalui <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf>
- Fitri, Hanna dan Basri. (2012). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lanjut Usia Bekerja di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: Universitas Riau
- Kementerian Kesehatan. (2014). *Situasi dan Analisis Lanjut Usia*. diakses melalui <https://pusdatin.kemkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infodatin-lansia.pdf>
- Kementerian Kesehatan. (20 Januari 2021). *Indonesia menuju Struktur Penduduk Tua* diakses pada 01 Juni 2022 melalui <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20200922/5234994/indonesia-menusju-struktur-penduduk-tua/>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2021). *Profil Anak Indonesia 2021*. Diakses melalui <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/25/3826/profil-anak-indonesia-tahun-2021>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan. (2018). *Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar di Provinsi Papua dan Papua Barat*, Dikases melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/250647886.pdf>
- Kodaruddin, W. N. (2019). *Motivasi Lanjut Usia Merawat Cucu*. *Sosio Informa*. 5(3).
- Mannheim, K. (1952). *The sociological problem of generation. Essays on the Sociology of Knowledge*, 163–195.
- Ryder, N. B. (1965). *The Cohort as a Concept in the Study of Social Change*. *American Sociological Review*, 30(6), 843. <https://doi.org/10.2307/2090964>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2014). *Economic development (12th edn.)*, Pearson, New Jersey.
- Triwidodo, Murdiyono & Anas Hidayat. (1991) *Sektor Informal : Permasalahan dan Harapan*. diakses pada 20 April 2022 melalui <https://journal.uui.ac.id/Unisia/article/download/5179/4624>

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DATA
MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA BARAT**

Jl. Trikora Sowi IV No. 99, Distrik Manokwari Selatan, Manokwari - Papua Barat

Telp : Telp (62-986) 2210054

Homepage : <http://papuabarat.bps.go.id> E-mail : bps9100@bps.go.id